MAHAKA GROUP

NOMOR 231/TAHUN KE-28

REPUBLIKA

Rp. 5.500/16 HALAMAN

Luar P Jawa Rp 6.000
(ditambah ongkos kirim)

RO

SENIN, 7 SEPTEMBER 2020 | 19 MUHARRAM 1442 H

www.republika.co.id

@republikaonline @republikaonline RepublikaOnline

YULIUS SATRIA WIJAYA/ANTARA



SANKSI Petugas Satpol PP Kabupaten Bogor menggotong seorang pelanggar protokol adaptasi kebiasaan baru (AKB) dengan tandu menuju permakaman di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (6/9). Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan sanksi denda sebesar Rp100 ribu serta sanksi sosial, membersihkan area makam, *push-up*, dan mengikuti prosesi pemakaman Covid-19, untuk memberikan efek jera kepada warga yang tak mengenakan masker di tempat umum.

Awas Klaster Pilkada

KPU menyatakan akan kembali mengevaluasi regulasi pilkada pada masa pandemi.

■ BINTI SHOLIKAH, FEBRIAN FACHRI

SOLO — Hari terakhir pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) pilkada serentak 2020 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ahad (6/9), masih diwarnai rombongan dan arak-arakan massa. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran soal penularan Covid-19 pada tahapan pilkada serentak.

Di Solo, Jawa Tengah, 2.000 orang diklaim mengantarkan bapaslon wali kota dan wakil wali kota Solo jalur independen Bagyo Wahyono-FX Suparjo (Bajo) ke kantor KPU Solo, Ahad (6/9). Ketua Pelaksana Harian Tim Pemenangan Bajo, Robert Hananto, mengaku tak berhasil meminta para pendukung untuk tak ikut ke KPU.

"Tadi di perjalanan kita sudah mengatur, tadi ada yang pakai masker, jalan juga jaga jarak dan duadua," kata Robert kepada wartawan di kantor KPU Solo. Sebelumnya, seribuan pendukung juga menyertai bakal calon Gibran Rakabuming yang merupakan putra Presiden Joko Widodo mendaftar pada Jumat (4/9).

Di Kota Bukittinggi, Sumatra Barat, pendaftaran bapaslon Erman Safar-Marfendi juga memancing kehadiran massa. Massa baru bubar setelah Ustaz Abdul Somad yang ikut mengantar mengeluarkan perintah. "Ayo kita pulang dengan tenang, ambil sampah-sampah, tetap ikut protokol kesehatan. Tunjukkan bahwa kita orang beradab, orang yang beradat, dan orang beragama," kata Ustaz Abdul Somad.

KPU merekap, sebanyak 558 bapaslon mendaftar pencalonan pilkada 2020 per Ahad (6/9), pukul 17.30 WIB. Perinciannya, 463 bapaslon pemilihan bupati dan wakil bupati di 196 kabupaten, 79 bapaslon wali kota dan wakil wali kota di 29 kota, dan 16 bapaslon pemilihan gubernur.

Pendaftaran bapaslon kemarin baru satu dari sejumlah tahapan pilkada 2020 yang berpotensi memunculkan kerumunan. Selanjutnya ada tahap pengundian nomor urut pada 24 September, masa kampanye (26 September-5 Desember), pemungutan dan penghitungan suara (9 Desember), dan pengumunan hasil pilkada pada 9-15 Desember.

Regulasi masa pandemi tahapan itu sedianya sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020. Tak ada pelarangan tatap muka dan pengumpulan massa selama diikuti protokol kesehatan dan sejumlah pembatasan mulai dari 50 persen kapasitas ruangan hingga kehadiran maksimal 50-100 peserta acara.

BERITA TERKAIT

Arak-arakan tak Relevan

Hlm- 7

Juru Bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Halik Malik mewantiwanti penyelenggara pilkada serentak agar lebih mengedepankan protokol kesehatan. Ia mengungkapkan, pihaknya sudah terlibat langsung dalam penyusunan tata cara penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi.

Ia menyayangkan apabila ada calon kepala daerah yang seharusnya memberikan contoh pelaksanaan protokol kesehatan justru melanggarnya. IDI mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar secara tegas menegur pihak yang terbukti melanggar protokol kesehatan, seperti menciptakan kerumunan massa.

IDI menyoroti dua aspek yang perlu menjadi fokus pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Pertama, pemberlakuan protokol kesehatan demi mencegah pandemi yang makin meluas dan mencegah petugas penyelenggara kelelahan hingga menimbulkan korban jiwa.

"Karena dulu (pada Pilpres 2019) belum ada pandemi saja sudah ada korban 600-an orang (petugas KPPS). Saat ini juga demikian, belum ada pilkada saja sudah banyak klaster dan jumlah kasus masih tinggi. Dan kita tahu pandemi belum terkendali," ujar Halik.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengusulkan ada tindakan tegas terkait pelanggaran protokol kesehatan pilkada. "Saya usulkan agar KPU, Bawaslu diskualifikasi bapaslon yang tak peduli protokol kesehatan Covid-19," ujar Bahtiar kepada *Republika*, Ahad (6/9).

Untuk pejawat yang maju dalam pilkada 2020, Kemendagri dapat memberikan teguran tertulis jika yang bersangkutan melanggar protokol kesehatan. "Peraturannya sudah jelas. Jadi, bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi," kata dia.

Bahtiar juga mendorong aparat keamanan menegakkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur sanksi pelanggaran protokol kesehatan. "Mohon pimpinan parpol untuk mengingatkan paslonnya. Begitu pula dengan bapaslon perseorangan," ujar Bahtiar.

KPU berjanji akan mengevaluasi teknis tahapan pilkada berikutnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan, KPU sedang melakukan proses perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada.

Raka mengatakan, selain PKPU Nomor 10 Tahun 2020, banyak peraturan dan perundang-undangan yang bahkan mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Di antaranya berupa teguran, dilarangnya pelanggar protokol kesehatan mengikuti kegiatan pilkada, hingga diskualifikasi bapaslon. "Inti permasalahannya apakah pada pengaturan normanya ataukah pada implementasinya. Hal ini tentu sangat penting untuk dikaji dan dicarikan jalan keluarnya," ujar Raka.

■ sapto andika candra/mimi kartika
ed: fitriyan zamzami

IKHTISAR PKPU MASA PANDEMI

- Kegiatan tatap muka dibolehkan dengan protokol kesehatan **(pasal 6).**
- Kegiatan pengumpulan massa dibolehkan dengan protokol kesehatan **(pasal 7).**
- Pendaftaran calon tak melarang kehadiran pendukung **(pasal 49).**
- Kampanye tatap muka dibolehkan dengan batas 50 peserta **(pasal 58).**
- Debat tatap muka dibolehkan dengan batas 50 peserta **(pasal 59).**
- Kampanye rapat umum, konser musik, dan sebagainya dibatasi 100 orang **(pasal 63).**
- Pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan protokol kesehatan **(pasal 68).**

Sumber: PKPU Nomor 10 Tahun 2020

Potensi Kekeringan Terus Meningkat

■ FEBRIAN A, BOWO PRIBADI

JAKARTA — Jumlah wilayah yang berstatus awas kekeringan di Indonesia meningkat menjadi 23 wilayah. Warga di berbagai kabupaten/kota yang terdampak mulai merasakan kekurangan air bersih. Musim kemarau yang memasuki fase puncak menjadi penyebabnya.

Berdasarkan peta peringatan dini kekeringan meteorologis terkini yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terdapat 23 kabupaten/kota yang berstatus awas. Peringatan dini diklasifikasikan dalam tiga jenis, yakni waspada, siaga, dan awas.

Wilayah berstatus awas terbanyak (14) di NTT. Mulai dari Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kota Kupang, hingga Kabupaten Kupang. Lalu Manggarai Barat, Nagekeo, Ngada, Sikka, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, hingga Timor Tengah Timur. Wilayah berstatus awas terbanyak kedua (5) di NTB. Mulai dari Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Timur, hingga Sumbawa.

BERITA TERKAIT

Agar tak Lagi Kekeringan

Hlm- 7

Selanjutnya, dua wilayah di Provinsi Maluku, yakni Maluku Barat Daya dan Maluku Tanimbar. Dua terakhir adalah Buleleng di Bali dan Selayar di Sulawesi Selatan.

Jumlah wilayah yang berstatus awas itu meningkat jika dibandingkan peta peringatan dini kekeringan meteorologis BMKG yang dirilis pada 23 Agustus 2020. Berdasarkan data akhir Agustus itu, jumlahnya baru 21 wilayah.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono Prabowo mengatakan, peningkatan itu terjadi karena musim kemarau di Indonesia berada di fase puncaknya (Agustus-September). Kini, sebanyak 87 persen wilayah Indonesia dilanda kemarau.

Bersambung Ke hlm 7 Kol 1-6

REHAT

Sertifikasi penceramah tuai respons
Good looking nggak* perlu sertifikasi *lah

Pemulihan ekonomi butuh disiplin kesehatan
Kalau pemilihan kepala daerah, butuh?

PDIP Abstain di Sumbar



Mulyani-Ali Mukhni mengeklaim pengembalian SK PDIP desakan masyarakat.

» NASIONAL HLM 3

Erdogan: Berunding atau Hadapi Konsekuensi

Presiden Turki memperingatkan Yunani untuk berdialog mengenai sengketa klaim Mediterania timur.

» INTERNASIONAL HLM 4

Tren Kasus Masih Tinggi

DKI masih menyumbang kasus tertinggi dengan penambahan lebih dari 1.000 kasus.

» LAWAN COVID-19 HLM 12

REPUBLIKA ONLINE

Google play

App Store

HIKMAH

Muslim dan Adaptasi Kebiasaan Baru

■ OLEH **EDE SURYA DARMAWAN**

Umat Islam telah Allah takdirkan sebagai pewaris risalah Ilahiyah yang lengkap dan berkesinambungan. Risalah sejak nabi dan rasul pertama hingga disempurnakan dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW (QS al-A'la: 14-19).

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)," bunyi QS al-A'la ayat 14. Tadabur ayat-ayat itu menunjukkan bahwa Allah SWT benar-benar telah memberikan kemuliaan dan keberuntungan kepada umat Islam yang meninggikan syariat-Nya dan berusaha menyucikan diri, menegakkan shalat, dan tidak teperdaya tipuan dunia yang fana.

Dalam penerapan risalah Islam, Allah SWT turunkan secara bertahap yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Para sahabat menerimanya dengan tunduk patuh dan penuh semangat. Sebagaimana kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan khamar ketika Allah SWT mengharamkannya. Demikian pula dengan kesigapan para Muslimah dalam menjalankan perintah untuk mengenakan jilbab.

Saat ini kita dihadapkan pada pandemi Covid-19. Hingga kini belum ditemukan obat yang dapat membunuh virus Covid-19, begitu juga vaksin untuk mencegahnya.

Maka, satu-satunya cara paling efektif menghadapi virus ini adalah melakukan upaya pencegahan sehingga tidak tertular atau menularkan. Perilaku pencegahan ini merupakan adaptasi terhadap kebiasaan baru atau AKB. Menilik balik catatan sejarah tentang bagaimana sikap dan perilaku para sahabat Nabi Muhammad SAW di atas, kita mesti bersegera melaksanakan protokol kesehatan yang berbuah pada kebaikan diri dan orang sekitar.

Karena lebih baik menggunakan masker yang jelas manfaatnya daripada nekat tanpa masker dengan alasan tawakal kepada Allah. Hal itu tidak dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat: "Ikatlah untamu, baru kemudian engkau bertawakal kepada Allah."

Perjuangan melawan virus Covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir. Layaknya peperangan pada zaman Rasulullah dan para sahabat saat itu, mereka selalu memakai baju zirah (baju besi) sebagai bentuk kesiapan dan kesiagaan menghadapi serangan musuh. Mereka berusaha maksimal, baru kemudian bertawakal.

Sebagai umatnya yang mengikuti jalan hidup Rasulullah dan para sahabat, marilah kita lawan virus Covid-19 dengan usaha maksimal dalam bentuk perilaku lebih bersih, lebih sehat, dan lebih taat terhadap protokol kesehatan. Kita aman dari ancaman virus Covid-19, tapi tetap produktif. ■

ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA



TINJAUAN Menteri Sosial Juliari P Batubara (kedua kanan) didampingi Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto (kanan) meninjau stok beras saat kunjungan kerja di Gudang Bulog Cimindi, Kota Cimahi, Sabtu (5/9). Dalam kunjungan kerja tersebut, Mensos Juliari juga memeriksa kesiapan Bulog Jawa Barat dalam penyaluran bantuan berupa beras sebanyak 45 kilogram bagi 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat.

KPK Segera Undang Kejaksaan dan Kepolisian

Surat perintah supervisi kasus jaksa Pinangki sudah terbitkan.

■ DIAN FATH RISALAH
BAMBANG NOROYONO

JAKARTA — Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri memastikan dalam waktu dekat lembaganya akan mengundang Kejaksaan Agung dan kepolisian terkait penanganan skandal Djoko S Tjandra. Pimpinan KPK telah menerbitkan surat perintah supervisi kasus dugaan korupsi yang menjerat Djoko S Tjandra dan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"Iya (akan memanggil kejaksaan dan kepolisian), " ujar Ali saat dikonfirmasi *Republika*, Ahad (6/9).

Namun, Ali tak mengung-kapkan secara perinci kapan lembaga anti rasuah menjadwalkan pertemuan dengan dua lembaga penegak hukum tersebut. "Terkait agenda ini nanti kami akan infokan lebih lanjut, ya," ucap Ali.

Skandal Djoko Tjandra yang saat itu masih buron mulai terungkap setelah ia mengajukan peninjauan kembali (PK) kasusnya pada Juni lalu. Belakangan terungkap, terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali itu mengupayakan bebas dari jerat hukum dengan menyuap sejumlah oknum penegakan hukum. Saat ini, tiga berkas perkara yang berbeda yang tengah dalam penyidikan. Yaitu, kasus penghapusan *red notice* Djoko, kasus penerbitan surat jalan dan dokumen lain, dan kasus suap dan gratifikasi upaya pembebasan melalui fatwa Mahkamah Agung (MA).

Kasus pertama dan kedua melibatkan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo dan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan ditangani oleh Bareskrim Polri.

Sementara kasus suap upaya pembebasan dengan fatwa MA melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari dan ditangani Kejaksaan. Banyak banyak pihak meminta KPK mengambilalih kasus-kasus tersebut agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Jumat (4/9), mengatakan, pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Penindakan KPK Karyoto untuk menerbitkan surat perintah supervisi tersebut. KPK juga akan mengundang dua institusi penegak hukum tersebut untuk melakukan gelar perkara dalam waktu dekat.

"KPK akan melihat perkembangan penanganan perkara tersebut untuk kemudian mengambil sikap pengambilalihan apabila memenuhi syarat-syarat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10-A UU No 19 Tahun 2019," ujar Marwata.

Alex menjelaskan, supervisi tidak perlu menunggu penyusunan peraturan presiden lebih lanjut. KPK pun mengajak masyarakat bersama-sama mengawasi penanganan perkara tersebut. "Kita perlu melihat perkara ini secara serius karena diduga melibatkan aparat penegak hukum," kata Alex.

Alex juga menampik adanya perbedaan pandangan di antara para pimpinan KPK terkait koordinasi supervisi perkara yang ditangani Kejakgung dan Polri. Ia menegaskan, pernyataan para pimpinan KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Dalam perkara yang ditangani Kejakgung itu, selain jaksa Pinangki, kasus itu juga menersangkakan Djoko Tjandra dan politikus Nasdem, Andi Irfan.

Kasus itu juga diduga melibatkan hakim. Sebab, dalam penetapkan tersangka terhadap Andi Irfan pada Rabu (2/9), ia dikenakan pasal pemberian dan janji haram kepada para hakim, yaitu Pasal 5 ayat (2), *juncto* ayat (1) b, atau Pasal 6 ayat (1) a, dan Pasal 15 UU Tipikor 31/1999-20/2001.

Pasal 6 ayat (1) a, tidak disangkakan terhadap Djoko dan Pinangki. Pasal tersebut khusus memberikan ancaman tiga sampai 15 tahun penjara, bagi setiap orang yang memberi, ataupun menjanjikan sesuatu kepada hakim. Direktur Penyidikan di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejakgung, Febrie Adriansyah, belum bersedia menjelaskan perbedaan jeratan hukum antara ketiga tersangka itu.

Namun, pekan lalu, Febrie menerangkan, pasal pemberian suap, dan gratifikasi terhadap hakim tersebut, belum berarti perbuatan itu sudah dilakukan, dan terjadi. Artinya, penyidikan belum menemukan alat bukti yang kuat tentang kepastian adanya penerimaan uang, dan janji dari Andi, maupun Pinangki, ke para hakim itu. "Fatwa dari MA itu, *kan* bisa-bisanya Pinangki (dan Andi) saja," kata Febrie.

Ketua Muda MA Bidang Pengawasan, Andi Samsan Nganro, juga menegaskan, tak pernah ada pengajuan fatwa hukum terkait pembebasan Djoko di MA. Andi meminta agar pihak manapun yang menuding adanya peran para hakim, maupun pejabat MA dalam upaya penerbitan fatwa hukum Djoko, agar memastikan kebenaran tudingan tersebut.

"Kami belum tahu urusan permohonan fatwa hukum ke MA terkait terpidana Djoko S Tjandra itu. Untuk itu, kami tidak perlu menanggapi (dugaan) itu," kata Andi lewat pesan singkatnya kepada *Republika*. ■ **ed:** ilham tirta

KILAS

KPK Pertimbangkan Penundaan Proses Hukum Cakada

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempertimbangkan penundaan proses hukum bagi calon kepala daerah yang ikut pilkada serentak 2020. Kapolri Jenderal Idham Aziz menerbitkan surat telegram rahasia (TR) untuk menjaga netralitas anggota Polri saat pelaksanaan pilkada 2020.

"Kami memahami pertimbangan penundaan proses hukum bagi peserta pilkada agar proses hukum tidak disalahgunakan pada kepentingan politis, (saat ini) KPK masih akan mempertimbangkan kebijakan seperti itu apakah diperlukan atau tidak," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Ahad (6/9).

Menurut Ghufron, setiap kasus yang ditangani KPK telah ditentukan standar operasionalnya. Ia memastikan seseorang yang ditersangkakan ataupun ditahan KPK sudah memenuhi syarat dan prosedur yang sangat ketat. "Kami sangat yakin proses hukum yang kami laksanakan sesuai peraturan tidak akan terintervensi oleh tekanan, desakan kemauan politik dalam masa pilkada ini," tutur Ghufron.

Ghufron menekankan, jangan sampai proses politik yang melibatkan biaya serta keterlibatan masyarakat cukup tinggi, tapi tidak mengungkapkan semua sisi dari para calon kepala daerah. KPK berharap pilkada ini mampu menemukan pemimpin daerah yang berintegritas. "Untuk itu, KPK masih akan mempertimbangkan hal tersebut," kata Ghufron.

Dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 per 31 Agustus 2020 tersebut mengatur soal netralitas dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan masyarakat khususnya di bidang penegakan hukum untuk menghindari *conflict of interest* serta menghindari pemanfaatan kepentingan politik oleh kelompok tertentu.

■ dian fath risalah **ed:** agus raharjo

141 Bakal Paslon Diduga Langgar Protokol Kesehatan

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat, sebanyak 141 bakal pasangan calon (bapaslon) diduga melanggar aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 saat melakukan pendaftaran pencalonan Pilkada 2020. Sejauh ini tercatat ada 315 bapaslon kepala daerah yang telah mendaftar.

"Seratus empat puluh satu bapaslon tersebut diduga melanggar aturan PKPU (peraturan PKU) yang secara tegas melarang konvoi dan arak-arakan di tengah pandemi Covid-19," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dikutip laman resmi Bawaslu RI, Sabtu (5/9). Dugaan pelanggaran ini terkait jumlah massa yang datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah setempat.

Atas hal tersebut, Fritz menegaskan, Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran dengan dua hal. Pertama, Bawaslu akan memberikan saran perbaikan (teguran). Kedua, Bawaslu bakal melaporkan bapaslon yang melanggar protokol kesehatan kepada pihak lain yang berwenang, seperti kepolisian.

Fritz mengatakan, KPU telah melakukan sosialisasi jauh-jauh hari sebelum waktu pendaftaran pencalonan dibuka kepada partai politik (parpol) untuk datang ke kantor KPU hanya dengan bapaslon, LO (*liaison officer*/penghubung), dan perwakilan pengurus parpol saja. Hal ini sebagai bagian penerapan protokol kesehatan.

Terkait sanksi, lanjut Fritz, apabila mengacu terkait Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU (PKPU) maka yang menjadi tanggung jawab Bawaslu adalah memberikan saran perbaikan. Selain itu, Bawaslu dapat memberikan dugaan pelanggaran administratif kepada bapaslon atau KPU yang diduga melanggar.

Selain UU Pilkada, masih ada UU lain yang perlu diperhatikan. Misalnya, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

■ mimi kartika **ed:** agus raharjo

Banjir Merendam 12 Desa di Kabupaten Landak

■ SAPTO ANDIKA CANDRA

JAKARTA — Banjir merendam 12 desa di enam kecamatan, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, hingga Ahad (6/9) pagi. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati menuturkan, banjir disebabkan luapan lima sungai setelah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir.

Kelima sungai yang meluap tersebut meliputi Sungai Behe, Sungai Dait, Sungai Landak, Sungai Menyuke, dan Sungai Meranti setelah hujan melanda sejak Jumat (4/9) hingga Sabtu (5/9). Desa-desa yang terdampak berada di Kecamatan Meranti, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Banyuke Hulu, Kecamatan Menyuke, Kecamatan Kuala Behe, dan Kecamatan Air Besar.

Banjir dengan ketinggian sekitar 80-110 sentimeter (cm) menggenangi sedikitnya 416 rumah yang dihuni 416 kepala keluarga. Selain itu, satu unit rumah dilaporkan rusak sedang dan tiga rumah lainnya mengalami rusak ringan akibat longsor. BPBD Kabupaten Landak beserta tim gabungan dari berbagai instansi sampai saat ini telah berupaya membuka jalur terdampak banjir dan longsor menggunakan alat berat di Desa Semunti, Kecamatan Air Besar.

Pendistribusian logistik dan evakuasi warga dengan perahu juga telah dilakukan BPBD Kabupaten Landak. Aktivasi posko darurat bencana juga telah dilakukan oleh tim setempat. Bupati Landak Provinsi Kalimantan Barat Karolin Margeret Natasa mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir dan tanah longsor yang masih akan terjadi di daerah itu.

"Menyikapi prakiraan cuaca dari BMKG, situasi Landak ma-sih akan mengalami hujan maka pemerintah mengimbau masya-rakat untuk waspada terhadap bencana banjir dan tanah longsor," kata Karolin di Ngabang, Ahad (6/9). Dirinya meminta agar masyarakat bisa bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan dan saluran air di sekitar lingkungan. Dia mengatakan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BPBD Landak, kondisi sampai hari ini bahwa banjir terjadi hampir di semua wilayah Kabupaten Landak.

"Yang terparah di Meranti, petugas sudah bergerak dengan membawa perahu fiber dan logistik untuk evakuasi warga yang membutuhkan. Kemudian, longsor juga terjadi di Emprija, yang Ahad diperkirakan alat berat da-tang, dan untuk sisa-sisa lumpur dibersihkan dengan mesin pe-nyemprot air sebanyak dua unit," tuturnya.

Dia menambahkan, untuk daerah lain belum terbagi perhatian, seperti Katio, Sejowet, Songga, Darit, Mandor, dan lain-lain yang laporannya belum sempat direspons. Namun, ada yang sudah diarahkan ke desa dan camat yang bersangkutan.

"Kami akan terus memantau kondisi terkini di lapangan dan meminta kepada petugas untuk melakukan pendataan terhadap jumlah masyarakat yang terdampak banjir. Yang jelas kita akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat," katanya. ■ antara **ed:** agus raharjo

Polri Tangani 107 Kasus Penyelewengan Bansos

■ HAURA HAFIZHAH
ARIE LUKIHARDIANTI

JAKARTA — Kepolisian menangani setidaknya 107 kasus penyelewengan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, kasus ini terjadi di seluruh jajaran Polda. Paling banyak terjadi di Polda Sumatra Utara (Sumut), yaitu 39 kasus.

"Dari data yang diterima terdapat 107 kasus penyelewengan bantuan sosial di 21 Polda," kata Awi saat dihu-bungi *Republika*, Ahad (6/9).

Ia memerinci, dari 39 kasus di Polda Sumut, sebanyak 31 kasus sudah dalam proses lidik, enam kasus sudah berhenti lidik, dan dua kasus sudah dilimpahkan ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Ia melanjutkan, di Polda Jawa Barat ada 19 kasus penyelewengan dan lima diantaranya sudah dilimpahkan ke APIP. Tiga provinisi lain dengan kasus terbanyak ada di Polda Riau, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan masing-masing sebanyak tujuh kasus. Dua kasus di Polda Riau sudah dilimpahkan ke APIP, sementara semua kasus di NTB dan Sulsel masih dalam lidik.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar pemda secara berkala memperbaharui data masyarakat penerima bansos dan subsidi yang dipadankan dengan nomor induk kependudukan (NIK). Pembaharuan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan data penerima bansos dan subsidi tepat sasaran. "De-ngan akurasi data ini kita berharap yang dipadankan dengan NIK kita bisa mengidentifikasi masyarakat penduduk yang berhak menerima subsidi itu tu-juannya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Rabu (26/8). Menurut dia, berdasarkan kajian yang dilakukan KPK, terdapat sejumlah penyaluran bansos dan subsidi yang tidak tepat sasaran.

> **Berdasarkan kajian KPK, terdapat sejumlah penyaluran bansos dan subsidi yang tidak tepat sasaran.**

Rampung

Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar sekaligus Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi, Dudi Sudradjat Abdurachim, pendistribusian bansos tahap II di Jabar sudah rampung. Persentase berhasil serah nyaris 100 persen. Dari 1.392.407 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima bansos, hanya 9.598 paket atau 0,6 persen yang gagal serah.

Menurut dia, angka itu memperlihatkan, pendataan yang dilakukan Pemprov Jabar baik dan akurat. Jabar, kata dia, melakukan 23 tahap *cleansing* data penerima Bansos Provinsi tahap II. "Kami menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos. Banyaknya tahapan cleansing data membuat data penerima bansos semakin akurat," ujar Dudi, Jumat (4/9).

Pemprov Jabar, kata dia, berkoordinasi dengan dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan KPK, supaya tidak ada penerima bansos ganda. Dudi menyatakan, hasil evaluasi distribusi bansos tahap I menjadi pertimbangan, seperti mengganti komoditas telur menjadi susu dan masker kain. "Waktu pendistribusian hampir sesuai jadwal yang telah ditetapkan," katanya.

Hingga pendistribusian Bansos tahap II selesai, kata dia, pihaknya belum menerima laporan adanya penyelewengan. Pemilihan mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, membuat distribusi bansos provinsi berjalan optimal. "Pasti kedua perusahaan itu akan menjaga reputasi," katanya.

■ dian fath risalah **ed:** ilham tirta

PDIP Abstain di Sumbar

IGGOY EL FITRA/ANTARA



MENDAFTAR Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah (kiri) dan Audy Joinaldy (kanan) menyapa wartawan usai menyerahkan berkas pendaftaran di Kantor KPU Sumatra Barat di Padang, Sumatra Barat, Jumat (4/9). Pasangan Mahyeldi-Joinaldy diusung PKS dan PPP.

Mulyadi-Ali Mukhni mengeklaim pengembalian SK PDIP desakan masyarakat

■ RIZKYAN ADIYUDHA, NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA—Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya harus menerima kenyataan abstain di pemilihan gubernur (pilgub) Sumatra Barat (Sumbar). Absennya partai berlambang banteng mocong putih ini setelah bakal pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni yang diusungnya bersama Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengembalikan surat rekomendasi dari DPP PDIP.

"Yang pasti kami tidak mengusung pasangan calon. Sama artinya absen dalam proses pilgub ini," kata Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra melalui pesan singkat kepada *Republika*, Ahad (6/9). Dia mengatakan, DPD Sumbar saat ini tengah menunggu instruksi selanjutnya dari DPP PDIP terkait langkah mereka dalam pilkada tingkat provinsi di Sumbar.

Indra meminta kader PDIP untuk tetap menjalankan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Terkait dukung-mendukung tentu kami menunggu instruksi DPP partai," katanya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai Mulyadi-Ali Mukhni tidak memiliki prinsip kokoh sebagai pemimpin. "Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi," ujar Hasto.

Ia menjelaskan, pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani merupakan sebuah harapan agar Sumatra Barat jauh lebih baik sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas. PDIP memahami sikap Mulyadi-Ali Mukhni di pilgub Sumbar karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip hanya menjadi ajang popularitas. "Bagi PDI Perjuangan, menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila," ujar Hasto.

Menurut Hasto, partainya tetap berkomitmen terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar. Meski, dalam 10 tahun terakhir diklaimnya tampak ada sesuatu yang berbeda. "Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal bismillah. Jadi, mari kita lihat secara objektif dan proporsional dan dijauhkan dari dinamika pilgub," ujar Hasto.

Sebelumnya, dalam pernyataannya saat membacakan dukungan PDIP untuk Mulyadi-ALi Mukhni, Puan menyelipkan harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. "Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan, Rabu (2/9) lalu.

Desakan masyarakat

Mulyadi-Ali Mukhni resmi menyatakan pihaknya mengembalikan surat rekomendasi dari PDIP pada Sabtu (5/9) kemarin. Keduanya mengaku saat pendaftaran bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar hanya diusung dua partai, yakni Demokrat dan PAN. "Ya kami sudah sepakati bersama Pak Mulyadi, kita kembalikan SK dukungan dari PDIP. Jadi, Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung Demokrat dan PAN. PDIP kami kembalikan lagi," kata Ali Mukhni, Sabtu.

Ali mengeklaim keputusan ini diambil karena dampak viralnya pernyataan Puan Maharani ketika membacakan deklarasi terhadap mereka. Ia menilai pernyataan Puan menyiratkan anggapan PDIP bahwa warga Sumbar selama ini tidak mendukung negara Pancasila. Para pengamat dan sejumlah tokoh di Sumbar menilai pernyataan Puan telah menyakiti warga Sumbar.

Ali Mukhni menjelaskan, pihaknya tidak jadi menerima dukungan dari partai penguasa sejak 2014 itu karena desakan dari masyarakat Sumbar, baik di kampung halaman maupun di perantauan. "Memang banyak tokoh masyarakat Minang yang telepon saya menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan," ujarnya.

Sementara itu, peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar, menilai keputusan Mulyadi-Ali Mukhni yang mengembalikan surat keputusan (SK) PDIP sebagai upaya mempertahankan suara konstituen di Sumbar. Pasalnya, pernyataan Puan yang juga Ketua DPR tersebut menimbulkan polemik..

"Itu saya rasa mungkin adalah tindakan yang harus dilakukan Mulyadi-Ali ini. Di satu sisi guna mempertahankan konstituennya di Sumatra Barat," ujar Rully saat dihubungi, Ahad (6/9).

Puan hingga saat ini belum memberikan klarifikasinya terhadap pernyataannya tersebut. Rully menilai jika tetap dipaksakan, dukungan PDIP dapat memengaruhi perolehan suara Mulyadi-Ali. "Itu pertimbangan politik yang harus dilakukan walaupun berat untuk menetralisir pendukung atau pemilih militan Mulyadi-Ali," ujarnya.

Selain itu, tak bergabungnya PDIP dalam koalisi Mulyadi-Ali tak memengaruhi syarat pencalonan keduanya di pilgub Sumbar. Pasalnya, Partai Demokrat dan PAN masing-masing memiliki 10 kursi di DPRD. "Dengan dukungan PAN dan Demokrat itu sudah melebihi ambang batas syarat pencalonan 13 kursi. Dengan tidak adanya PDIP, sebenarnya tidak ada masalah," kata Rully menegaskan.

■ febrian **ed:** agus raharjo

SUARA PDIP DI SUMBAR:

Pileg 2019	: **134.232 suara.**
DPR	: **0**
DPRD	: **3 orang**

Sumber: KPU

Mahfud: Politik Uang Selalu Ada

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO, EKO WIDIYATNO

JAKARTA — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui praktik politik uang (money politics) selalu terjadi dalam setiap pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia mengatakan, baik melalui proses pemilihan secara langsung maupun dipilih DPRD, praktik politik uang tidak bisa dihindari.

"Kalau pemilihan langsung kepada rakyat itu money politics-nya eceran. Kalau lewat DPRD itu borongan. Kita bayar ke partai, selesai," kata Mahfud dalam seminar daring bertema 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal', Sabtu (5/9). Kendati demikian, Mahfud menilai pemilihan pilkada secara langsung yang berlaku saat ini tetap memiliki nilai positif. Salah satunya tidak adanya partai politik yang koalisinya linier dari pusat ke daerah.

"Misalnya, PAN dengan PKS itu di atas tidak cocok, di daerah tertentu bergabung. Demokrat dengan PAN di pusat tidak cocok, di bawah bergabung. PDIP dengan PKS di daerah tertentu bergabung," ujarnya. Menurut Mahfud, tidak adanya koalisi permanen tersebut dinilai baik karena tidak akan terjadi pengelompokan ideologi. Semua partai hanya berpikir bagaimana calon yang didukung bisa menang.

"Oleh sebab itu, itu bagus bagi perkembangan ideologi kita. Tidak ada lagi kotak-kotak ideologis yang sekarang harus dipertentangkan sehingga kotak-kotak ideologis itu mungkin akan terjadi pilpres saja setiap saat, dan itu selesai begitu terjadi yang kalah mau bergabung atau yang menang mau narik yang kalah. Y,a itu seperti yang sekarang ini," tuturnya.

Gerakan masyarakat

Di Kabupaten Purbalingga, sejumlah masyarakat bertekad melawan politik uang pada Pilkada 2020. Melalui Karang Taruna Kabupaten Purbalingga, seluruh masyarakat bercita-cita pilkada dapat berjalan dengan bersih, damai, aman, kondusif, dan tanpa isu SARA.

"'Karang taruna akan mengawal pelaksanaan pilkada agar kampanye di Purbalingga bisa berlangsung aman dan bebas kampanye hitam, ujaran kebencian, serta praktik politik uang," kata Wakil Ketua 1 Karang Taruna Purbalingga Imam Yahdi saat membacakan ikrar di pendopo Setda Purbalingga, Sabtu (5/9).

Dalam acara pembacaan ikrar tersebut, ada 210 pengurus karang taruna yang ikut hadir. Pengurus yang hadir tidak hanya pengurus karang taruna di tingkat kabupaten, tetapi juga di tingkat kecamatan. Selain pernyataan sikap antipolitik uang, dalam ikrar tersebut ditegaskan bahwa seluruh anggota Karang Taruna Purbalingga juga akan tetap menjaga netralitas.

Bupati Dyah Hayuning Pratiwi dalam kesempatan itu mengatakan telah menyatakan kesepakatannya dengan penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pilkada damai serta pilkada yang terhormat, berintegritas, dan bermartabat. "Untuk mewujudkan hal itu, tentu dibutuhkan peran serta masyarakat, termasuk para generasi muda anggota karang taruna," katanya.

Dia juga menyampaikan apresiasi pada Karang Taruna Purbalingga yang akan membentuk satgas antipolitik uang. Bupati menyatakan, dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, masyarakat harus disadarkan agar tidak mudah tergiur iming-iming politik uang yang dapat mencederai demokrasi.

Bupati Tiwi juga berharap anggota Karang Taruna Purbalingga bisa menjadi contoh dalam menebarkan virus-virus positif kepada generasi muda, termasuk dalam menghambat praktik-praktik kampanye hitam, ujaran kebencian, dan penyebaran *hoaks*.

■ **ed:** agus raharjo

75 Persen ASN di DKI Bekerja dari Rumah

■ FAUZIAH MURSID, AMRI AMRULLAH

JAKARTA—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo berencana menerbitkan surat edaran (SE) terkait sistem kerja baru bagi aparatur sipil negara (ASN). Salah satu sistem kerja baru yang diatur adalah bekerja kedinasan dari rumah atau *work from home* (WFH) untuk ASN.

Nantinya, bagi daerah yang masuk risiko tinggi atau zona merah, pegawai ASN akan diatur untuk bekerja di kantor maksimal sebanyak 25 persen. Sementara itu, sisanya 75 persen akan bekerja dari rumah atau *work from home*. "Seingat saya (SE) Jumat (4/9) sore sudah selesai, Senin (hari ini) sudah diedarkan semua," tutur Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (6/9).

Tjahjo mengatakan, alasan diberlakukannya bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang terus melonjak. Apalagi, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan zona risiko penularan cukup tinggi. Karena itu, ketentuan bekerja dari rumah ini juga sudah melalui koordinasi dengan gugus tugas penanganan Covid-19. "Benar dan hasil rapat koordinasi dengan gugus tugas," ujar Tjahjo.

Ia pun mengingatkan ASN tetap menjadi pelopor dalam menekan penularan Covid-19 dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan. "Ikut menggerakkan lingkungan masyarakat di mana pun berada. Membangun gotong royong bersama TNI/Polri dan ikut perintah atasan di mana pun berada," katanya.

Kebijakan WFH bagi ASN sudah mengalami perpanjangan sejak kebijakan ini diterapkan pada awal pendemi Covid-19. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat menegaskan, setiap ASN yang bekerja dari rumah bukan libur. Kemenpan-RB meminta setiap ASN yang bekerja dari rumah tetap mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

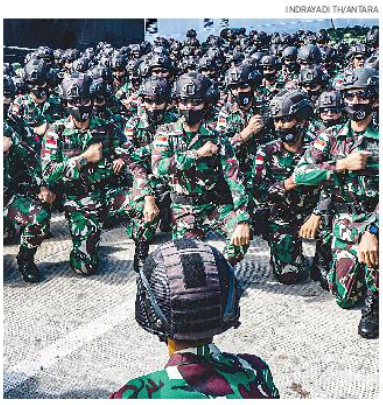
Kemudian, di dalam surat edaran tersebut para pejabat pembuat komitmen (PPK) perlu memperbarui data ASN yang terpapar atau terkonfirmasi positif Covid-19 melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Seperti diketahui, kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta mengalami tren kenaikan pada beberapa hari terakhir. Meskipun, pada Ahad (6/9) kasus positif di Ibu Kota turun menjadi 928 kasus berdasarkan catatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Republika mencatat, tren kasus di DKI mengalami kenaikan secara kontinu sejak akhir Juli.

Pada 27 Juli tercatat sebanyak 472 kasus dari sebelumnya yang hanya di kisaran 300 kasus. Sepekan kemudian, pada 6 Agustus, kenaikan kasus menyentuh angka 597. Pada pekan kedua hingga tanggal 25 Agustus, tren kasus berada di kisaran angka 600. Namun, memasuki akhir bulan, lonjakan kasus menyentuh 760 pada Kamis (27/8). Jumlahnya terus bertambah selang sehari dengan tercatat jumlah 816 kasus pada Jumat (28/8) dan 888 pada Sabtu (29/8).

Satpol PP dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindak pelanggaran penggunaan masker yang sudah digencarkan ke masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia menegaskan, begitu pula dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran PSBB lainnya. "Harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19," katanya menegaskan.

■ **ed:** agus raharjo

INDRAYADI TH/ANTARA



PERGANTIAN Prajurit Yonif Para Raider 432/Waspada Setia Jaya meneriakkan yel-yel usai apel penerimaan Satgas (Satuan Tugas) Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di pelabuhan Kota Jayapura, Papua, Ahad (6/9). Satgas Yonif Para Raider 432/Waspada Setia Jaya menggantikan Satgas Yonif Raider 751/Vira Jaya Sakti dalam tugas operasi Pamrahwan di wilayah Papua.

Istana: 'Larangan' Rangkap Jabatan Wamen tak Mengikat

■ SAPTO ANDIKA CANDRA

JAKARTA — Pihak istana kepresidenan memberi komentar terkait "larangan" Mahkamah Konstitusi (MK) bagi pejabat wakil menteri untuk rangkap jabatan. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menekankan bahwa MK sebenarnya tidak memberi putusan terkait rangkap jabatan wakil menteri.

Menurut dia, MK bahkan tidak menerima permohonan uji materi tentang jabatan wakil menteri yang diatur dalam Pasal 10 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara. "Namun, MK memang memberikan pendapat bahwa ketentuan rangkap jabatan yang berlaku terhadap menteri seharusnya diberlakukan *mutatis mutandis* terhadap jabatan wakil menteri," kata Dini, Ahad (6/9).

Dini pun mengingatkan bahwa pendapat yang disampaikan MK ini sifatnya tidak mengikat karena bukan bagian dari putusan. Kendati demikian, Dini menyebutkan bahwa pemerintah tetap memperhatikan dan mempelajari lebih lanjut pendapat MK tersebut.

"Soalnya di media masih banyak pendapat-pendapat blunder yang mengatakan bahwa pendapat MK itu adalah keputusan MK dan karenanya final serta mengikat," ujar Dini.

Sebelumnya, MK dalam pertimbangan putusan nomor 80/PUU-XVII/-2019 menegaskan, larangan rangkap jabatan berlaku pula bagi wakil menteri (wamen). Putusan ini terkait perkara uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri," ujar anggota majelis hakim, Manahan Sitompul, dalam sidang pembacaan putusan yang disiarkan daring, Kamis (27/8) lalu.

MK menegaskan hal tersebut karena pemohon mengemukakan tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Atas fakta tersebut, MK menjelaskan, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, wakil menteri ditempatkan juga sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri.

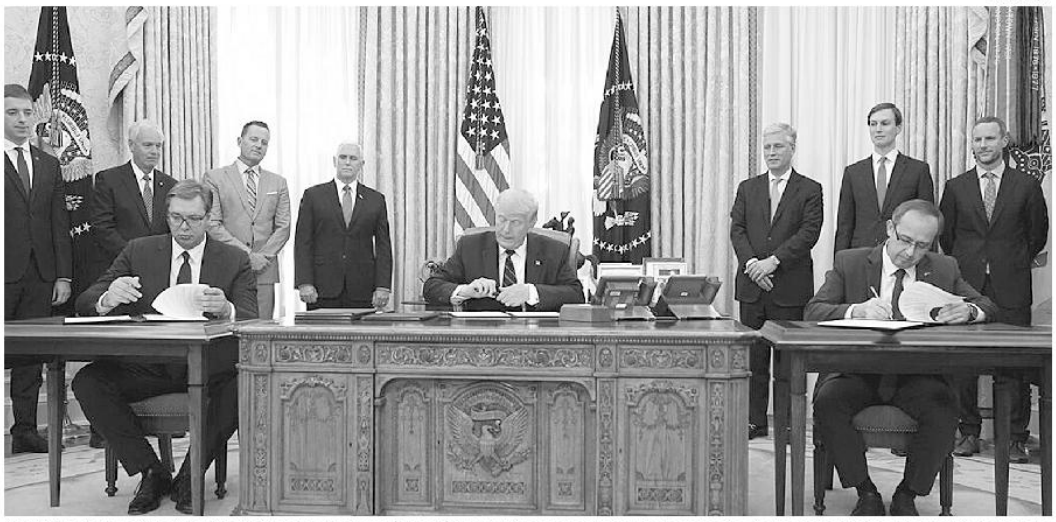
Gugatan tentang jabatan wakil menteri ini diajukan oleh Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Bayu Segara serta mahasiswa Usahid Jakarta, yakni Novan Lailathul Rizky. Mereka menilai penambahan jumlah wakil menteri dilakukan secara subjektif dan tanpa ada alasan urgensi yang jelas.

Kuasa hukum pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, menyebutkan dalam persidangan pendahuluan pada 10 Desember 2019 bahwa ada dua wakil menteri di Kementerian BUMN yang merangkap jabatan sebagai komisaris. Hal itu menandakan tugas wakil menteri tidak banyak dan urgen.

Pasalnya, menurut pemohon, apabila urgen, tidak mungkin kursi wakil menteri dididuduki seseorang yang sudah menjabat sebagai komisaris BUMN. Padahal, tujuan pengangkatan wakil menteri untuk mengemban beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus.

■ **ed:** agus raharjo

EVAN VUCCI/AP



NORMALISASI Presiden Amerika Serikat Donald Trump (tengah) menyaksikan penandatanganan normalisasi ekonomi oleh Presiden Serbia Aleksandar Vucic (kiri) dan Perdana Menteri Kosovo Avdullah Hoti (kanan) di Oval Office, Gedung Putih, Jumat (4/9). Trump juga berhasil meraih komitmen Serbia agar kedutaan besarnya di Israel dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Liga Arab Kritik Serbia Soal Yerusalem

Netanyahu menyatakan, Kosovo juga akan membuka kedubes di Yerusalem.

■ KAMRAN DIKARMA

KAIRO — Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengkritik keputusan Serbia memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal ini menyusul kesepakatan ekonomi Serbia dan Kosovo yang dimediasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat (4/9) waktu AS.

Dilaporkan laman kantor berita Palestina *WAFA*, Sabtu (5/9), Gheit menyebut, langkah yang hendak diambil Serbia bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB.

Negara-negara telah dilarang memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem karena kota itu sudah diduduki Israel melalui Perang 1967. Resolusi 478 tahun 1980 melarang negara mendirikan misi diplomatik di Yerusalem dan menolak tindakan apa pun yang akan mengubah status hukum kota.

Aboul Gheit menegaskan, Liga Arab telah menganggap Yerusalem sebagai salah satu masalah status terakhir yang akan dinegosiasikan antara Israel dan Palestina. Menurutnya, mengabaikan keputusan internasional dan mendahului hasil negosiasi adalah tindakan yang salah dan ilegal. Hal itu pun menghambat tercapainya perdamaian nyata berdasarkan solusi dua negara sesuai batas sebelum Perang 1967.

Sebelumnya, Duta Besar Palestina untuk Serbia Mohammed Nabhan telah terlebih dulu mengkritik dan memprotes pengumuman rencana pemindahan kedutaan besar Serbia untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Nabhan menegaskan, langkah semacam itu merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Di sisi lain, keputusan tersebut berbahaya bagi persahabatan Serbia-Palestina.

"Tidak ada keraguan bahwa ini akan merusak persahabatan yang telah lama antara Palestina dan Serbia dan tidak akan mendukung perkembangan ini," ujarnya.

Kosovo dan Israel saling mengakui

Para pemimpin Serbia dan Kosovo telah melakukan pertemuan serta pembicaraan di Washington. Pembicaraan yang disponsori AS itu mencapai tonggak bersejarah, yakni kedua negara setuju menormalisasi hubungan ekonomi.

"Dengan senang hati saya umumkan komitmen bersejarah ini," kata Trump di Oval Office, Jumat, didampingi Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Kosovo Avdullah Hoti. "Serbia dan Kosovo masing-masing telah berkomitmen untuk melakukan normalisasi ekonomi."

Serbia dan Kosovo pun menandatangani perjanjian terpisah dengan AS. Pada titik ini Serbia setuju membuka kantor perdagangannya di Yerusalem bulan ini. Serbia juga menyatakan komitmen dan kesediaan untuk memindahkan kedutaan besar (kedubes) Serbia dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Juli 2021.

Sementara, Kosovo hingga saat ini belum pernah mengakui Israel. Sebaliknya, Israel juga belum pernah mengakui Negara Kosovo sejak menyatakan merdeka dari Serbia pada 2008.

Peta hubungan diplomasi Israel dan Kosovo diungkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Jumat. Ia terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada presiden Serbia karena bersedia membuka kedubesnya di Yerusalem.

Kemudian, Netanyahu mengonfirmasi bahwa Israel dan Kosovo akan membangun hubungan diplomatik. Kosovo, katanya, akan membuka kedubesnya di Yerusalem.

> **Kosovo akan menjadi yang pertama sebagai negara dengan mayoritas Muslim untuk membuka kedubesnya di Yerusalem.**

"Kosovo akan menjadi yang pertama sebagai negara dengan mayoritas Muslim untuk membuka kedubesnya di Yerusalem," kata Netanyahu yang dikutip *Associated Press*. "Seperti yang telah saya ungkapkan dalam beberapa hari ini, lingkaran perdamaian dan pengakuan atas Israel meluas dan diharapkan akan makin banyak diikuti negara lainnya."

Baru ada dua negara dunia yang membuka kantor kedubes mereka Yerusalem. Keduanya adalah AS dan Guatemala. Bila terwujud, langkah mereka akan disusul Serbia dan Kosovo.

Pemerintahan Trump berupaya mendukung Israel untuk meningkatkan posisi tawarnya di pentas internasional. Atas mediasi AS, Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) menormalisasi hubungan diplomatik pada 13 Agustus.

AS juga mendesak negara lain menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun, langkah ini dikritik Palestina dan banyak negara Eropa karena hingga saat ini konflik Israel dan Palestina masih belum terurai.

Palestina berharap, dapat mendirikan negara di wilayah Tepi Barat dan Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai peta sebelum pendudukan Israel dalam Perang 1967. Dengan begitu, Palestina dan Israel akan berdiri dan ini sesuai formula "solusi dua negara" yang disepakati konsensus internasional.

■ ap/reuters **ed:** yeyen rostiyani

KILAS

Melbourne Perpanjang *Lockdown*

MELBOURNE — Kota terbesar kedua di Australia, Melbourne, akan memperpanjang *lockdown* sekurangnya hingga 26 Oktober meski kini sejumlah pelonggaran tetap dilakukan. Pada Ahad (6/9) Perdana Menteri Negara Bagian Victoria Daniel Andrews mengatakan, mulai 13 September jam malam dimundurkan satu jam menjadi jam 21.00 hingga 05.00 waktu setempat.

"Kita tidak bisa menampik *lockdown*. Kita harus mengambil langkah yang konsisten dan aman selain *lockdown* untuk memastikan bahwa kondisi normal dari Covid," kata Andrews.

Warga Melbourne yang tinggal sendiri dapat mengajukan nama orang yang boleh mengunjungi mereka. Warga juga diizinkan untuk berolahraga dalam periode dua jam setiap harinya. Hal lain yang diperbolehkan adalah melakukan interaksi sosial seperti piknik di taman umum atau sekadar membaca buku di bangku taman.

Pelonggaran aturan akan semakin dilakukan mulai 28 September. Pemberlakuan jam malam diperkirakan sepenuhnya dicabut mulai 26 Oktober.

Saat berita ini ditulis, data Johns Hopkins University menunjukkan, kasus global nyaris menyentuh angka 27 juta kasus Covid-19 secara global dan lebih dari 880 ribu kematian. Dari jumlah tersebut, lebih dari 6,24 juta kasus ada di Amerika Serikat (AS) dan lebih dari 4,12 juta kasus terjadi di Brasil. Jumlah kasus di India kini hampir menyamai kasus di Brasil, yaitu lebih dari 4,11 juta kasus.

Pada Jumat (4/9) lembaga kesehatan di University of Washington di AS memperkirakan, jumlah kematian di AS bisa mencapai 410 ribu jiwa pada akhir tahun ini. Jumlah kematian diperkirakan bisa mencapai 3.000 orang per hari pada Desember.

■ ap/yeyen rostiyani

Jerman Kaji Sanksi untuk Rusia

BERLIN — Pemerintah Jerman akan membahas kemungkinan menjatuhkan sanksi kepada Rusia terkait peracunan tokoh oposisi negara tersebut, Alexei Navalny. Jerman diketahui saat ini sedang menjadi ketua Uni Eropa (UE). "Jika dalam beberapa hari mendatang Rusia tidak membantu mengklarifikasi apa yang terjadi, kami akan dipaksa untuk membahas respons dengan sekutu kami," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas kepada surat kabar Jerman, *Bild*, pada Ahad (6/9) dikutip laman *the Guardian*.

Menurut dia, ada beberapa indikasi yang memperlihatkan Rusia terlibat dalam aksi peracunan Navalny. Satu di antaranya adalah racun yang digunakan untuk menyerang tokoh oposisi tersebut, yakni agen saraf Novichok era Uni Soviet.

"Hanya sejumlah kecil orang yang memiliki akses ke Novichok dan racun ini digunakan oleh dinas rahasia Rusia dalam serangan terhadap mantan agen Sergei Skripal," katanya, merujuk pada insiden 2018 di Kota Salisbury, Inggris, yang membidik agen ganda dan putrinya, Yulia Skirpal.

Pemerintah Rusia telah membantah rumor keterlibatan Presiden Vladimir Putin dalam kasus peracunan Navalny. Istana Kepresidenan Kremlin menginginkan dialog dengan Jerman atas kasus Navalny. Rusia menyatakan, dokter Rusia yang merawatnya pada awal kejadian jauh lebih transparan daripada dokter Jerman yang merawatnya sekarang.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, Moskow masih ingin mencari tahu dari Jerman zat yang menyebabkan Navalny jatuh sakit di Siberia bulan lalu. Rusia percaya kalau kondisi Navalny bukan karena keracunan, merujuk hasil laporan dokter pertama kali. "Para spesialis Jerman berhasil menemukan sejenis zat beracun. Kami mengandalkan dialog dengan kolega Jerman kami," ujar Peskov. ■ reuters/kamran dikarma/dwina agustin **ed:** yeyen rostiyani

Erdogan: Segera Berunding atau Hadapi Konsekuensi

■ DWINA AGUSTIN

ANKARA — Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, Sabtu (5/9), memperingatkan Yunani untuk memasuki pembicaraan mengenai sengketa klaim teritorial Mediterania timur. Dia mengancam Yunani jika tidak mau melakukan pembicaraan maka akan menghadapi konsekuensinya.

"Mereka akan memahami bahasa politik dan diplomasi atau di lapangan dengan pengalaman yang menyakitkan," kata Erdogan pada upacara pembukaan rumah sakit di Istanbul.

Ankara saat ini berhadapan dengan Yunani dan Siprus atas hak eksplorasi minyak dan gas di Mediterania timur. Semua pihak telah mengerahkan angkatan laut dan udara untuk menegaskan klaim di wilayah tersebut.

"Mereka akan memahami bahwa Turki memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk merobek peta dan dokumen tidak bermoral yang diberlakukan," kata Erdogan.

Erdogan merujuk pada daerah yang ditandai oleh Yunani dan Siprus sebagai zona maritim ekonomi mereka. Dia menekankan bahwa Turki siap untuk setiap kemungkinan dan hasil dari masalah Mediteranian yang sedang berlangsung.

Erdogan mengatakan, Turki telah berulang kali menyatakan kesediaannya untuk mencapai kesepakatan yang adil. "Kata-kata kami tulus.

Masalahnya adalah mereka yang berada di hadapan kita mengabaikan hak-hak kita dan mencoba menempatkan diri mereka di atas kita," ujarnya.

Komentar presiden muncul setelah Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengatakan, perwira militer dari Yunani dan Turki telah memulai diskusi teknis untuk mengurangi risiko konflik bersenjata atau kecelakaan. Kedua sekutu NATO ini telah terkunci selama berminggu-minggu dalam kebuntuan masalah di Mediterania timur.

Turki mencari cadangan energi di daerah yang diklaim Yunani sebagai landas kontinennya sendiri. Ankara mengatakan, berhak untuk mencari prospek di sana dan menuduh Athena mencoba mengambil bagian sumber daya laut yang tidak adil.

Sementara itu, media Turki melaporkan bahwa tank-tank sedang dipindahkan menuju perbatasan Yunani. Surat kabar *Cumhuriyet* mengatakan, 40 tank diangkut dari perbatasan Suriah ke Edirne di kawasan barat laut.

Turki dan memperlihatkan kendaraan lapis baja yang dimuat ke truk. Seorang pejabat militer yang berbicara tanpa dise-butkan namanya mengatakan, pengerahan itu adalah aktivitas rutin dan tidak terkait dengan ketegangan dengan Yunani.

Krisis baru-baru ini adalah yang paling serius dalam hubungan Turki-Yunani dalam beberapa dekade. Tetangga telah berada di ambang perang tiga kali sejak pertengahan 1970-an, termasuk sekali atas sumber daya laut di Laut Aegea.

Simulasi pertempuran udara antara pilot pesawat tempur Yunani dan Turki telah berlipat ganda di Laut Aegea dan Mediterania timur.

Sebuah fregat Turki dan Yunani bertabrakan bulan lalu dilaporkan menyebabkan kerusakan kecil pada fregat Turki, tetapi tidak ada yang terluka.

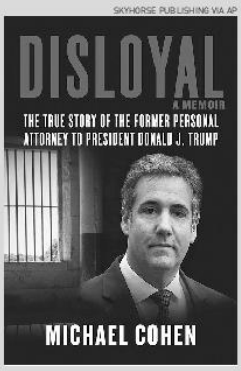
Selain Yunani, Turki menghadapi banyak lawan di Mediterania timur. Prancis, Italia, dan Uni Emirat Arab telah mengirim pasukan untuk bergabung dengan ketegangan dalam beberapa pekan terakhir. Mesir telah menandatangani kesepakatan eksplorasi energi dengan Athena untuk Mediterania.

Uni Eropa juga mengancam kemungkinan sanksi terhadap Ankara atas tindakan ilegal dalam mencari cadangan minyak di bawah laut.

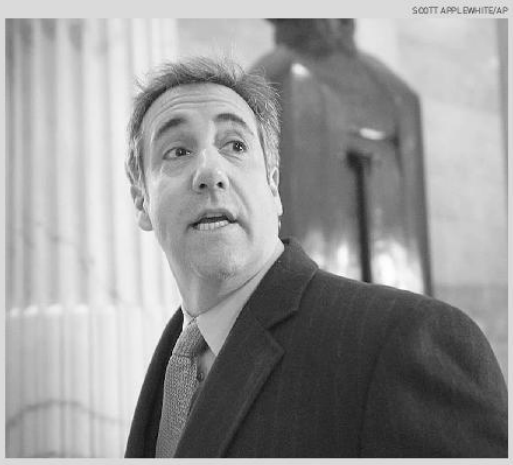
■ ap **ed:** yeyen rostiyani

Memoar Sang Saksi Mata

SKYHORSE PUBLISHING VIA AP



SCOTT APPLEWHITE/AP



Michael Cohen, mantan pengacara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, siap meluncurkan buku berjudul *Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J Trump*. Buku yang diyakini membongkar banyak rahasia itu akan diluncurkan pada Selasa (8/9) waktu AS.

Associated Press memberikan sejumlah bocoran isi buku tersebut, termasuk beberapa hal pribadi dalam hubungannya dengan Trump.

Cohen menilai, dirinya "saksi mata penting" dalam konspirasi uang tutup mulut terkait Trump. Ia menyebut bukunya ini sebagai potongan barang bukti yang fundamental atas kesalahan Trump.

Dalam buku ini, Cohen menyebutkan rincian perannya untuk memberi uang tutup mulut 130 ribu dolar AS kepada bintang film porno, Stormy Daniels. Tujuannya, agar Daniels tak mengungkap hubungannya dengan Trump menjelang pemilihan presiden 2016.

Meski awalnya menolak membayar, tulis Cohen, Trump akhirnya bersedia membayar Daniels. Saat itu, Trump beralasan, dirinya harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi untuk istrinya jika hubungannya dengan Daniels terungkap. Menurut Cohen, setelah urusan pembayaran itu dirinya mendapatkan imbalan dari Trump atas jasa hukum fiktif.

Cohen dikenal sebagai mantan tangan Trump. Hasil investigasi oleh penyidik khusus menyatakan ia bersalah dan membuat dirinya diproses secara hukum.

Cohen mengaku bersalah atas pelanggaran dana kampanye pilpres dan sejumlah perkara lainnya. Atas kesalahannya, hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun di penjara federal.

Cohen diizinkan menjalani tahanan rumah mulai Juli dan mencabut larangan untuk berbicara kepada publik. Namun, ia harus dikembalikan ke penjara karena dinilai melanggar aturan karena menerbitkan buku menjelang pemilihan presiden November.

Cohen mengaku tak mengerti mengapa saat itu dirinya begitu setia pada Trump. Ia juga tak habis pikir mengapa Trump mengabaikannya saat ia berada di titik rawan dalam hidupnya.

"Hanya kisah ini yang tersisa untuk istri, anak, dan negara yang begitu saya cintai," tulis Cohen.

■ ap/yeyen rostiyani

TAJUK

Tetap Jaga Disiplin

Prosesi pilkada serentak dimulai. Setiap pasangan calon kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi mendaftarkan diri ke komisi pemilihan umum setempat. Tahapan ini, melahirkan kerumunan massa pendukung.

Dalam kondisi normal, massa yang membeludak, mengantarkan pasangan yang dijagokannya, tentu tidak masalah. Ini menjadi semacam euforia dan dukungan yang bakal melipatgandakan semangat calon dan timnya memenangkan kontestasi.

Namun, saat pandemi Covid-19 masih belum terkendali, tentu melahirkan kekhawatiran baru. Bisa jadi, kerumunan massa, pada proses pilkada ini baik saat pendaftaran pasangan calon, juga nantinya mungkin kampanye, menjadi klaster penularan baru.

Ketika individu-individu berhimpun dan menjelma sebagai massa, tentu akan lebih sulit mengendalikannya. Hampir mustahil keberadaan massa akan mengindahkan protokol kesehatan, misalnya, soal jaga jarak. Termasuk mengenakan masker.

Butuh ketegasan pihak berwenang menegakkan aturan yang berlaku. Termasuk kesadaran dari para elite partai, pasangan calon, juga tim pemenangan untuk saling mengingatkan diri dan pendukungnya tetap menjaga protokol kesehatan.

Sampaikan teguran bahkan sanksi sesuai aturan jika memang ada pihak yang terbukti melanggar. Tak peduli siapa pun pasangan calon tersebut maupun partai pengusungnya. Ini demi kepentingan nasional, mencegah kian tak terkendalinya kasus baru Covid-19.

Apalagi, dalam lima hari berturut-turut, penambahan kasus Covid-19 di negeri kita selalu menembus angka 3.000-an. Pada Ahad (6/9), pemerintah menyatakan ada penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 3.444 orang dalam 24 jam terakhir.

Pada 2 September penambahan kasus sebanyak 3.075 kasus, 3 September 3.622 kasus, 4 September 3.269 kasus, dan 5 September 3.128 kasus. Merujuk pada data tersebut, setiap pihak harus menjaga disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Dalam konteks prosesi pilkada, tentu para elite politik dituntut tanggung jawabnya ikut serta dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Mestinya tak muncul klaster pilkada misalnya, setelah lahirnya klaster keluarga, pabrik, dan klaster lainnya.

Dengan demikian, mereka tak sekadar memikirkan kemenangan dalam kontestasi, tetapi juga kepentingan lebih luas. Minimal kepentingan daerah tempat mereka tinggal agar tak menambah munculnya kasus positif.

Apalagi, selama ini pemda sudah bekerja keras untuk meredam penyebaran Covid-19. Jangan sampai, pengabain protokol kesehatan ini justru menjadi beban setelah pemda saat ini bekerja keras dengan mengerahkan beragam sumber daya menanggulangi pandemi.

Jika para pasangan calon, tim pemenangan, pendukung, dan partai pendukungnya mengabaikan potensi munculnya klaster baru ini, ada kemungkinan juga akan membebani pemerintahan daerah baru kelak.

Artinya, mereka harus menanggung beban atas klaster baru yang terjadi saat ini. Tentu akan lebih banyak sumber daya yang akan habis, yang mestinya bisa dialokasikan ke hal strategis lain demi meluasnya pembangunan.

Secara global, pandemi Covis-19 ini juga belum ketahuan ujungnya. Hampir semua pemerintahan di dunia tetap berlaku waspada dengan langkah yang mereka tempuh. Mereka terus mendisiplinkan warganya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Kuncinya memang kedisiplinan seluruh masyarakat dunia mematuhi protokol kesehatan. Mereka diminta tak lengah meski sudah banyak berita mengenai munculnya potensi vaksin. Meski menggembirakan, proses hadirnya vaksin dan vaksinansi butuh waktu. ■

SUARAPUBLIKA

Minimnya Kedisiplinan

Pandemi Covid-19 belum berakhir. Masyarakat dunia masih harus berjuang dan melindungi diri dan keluarga dari ancaman Covid- 19. Sayangnya, sebagian masyarakat justru abai terhadap bahaya Covid dan tidak mematuhi protokol kesehatan.

Perilaku masyarakat yang abai ini, terjadi di tengah masifnya deteksi Covid-19 dan berlakunya masa kenormalan baru. Maka, hal tersebut berdampak pada jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang cenderung mengalami lonjakan dan sulit dikendalikan.

Titis Afri Rahayu, Cirebon

Kartun Nabi Bentuk Intoleransi

Penerbitan ulang 12 kartun Nabi Muhammad oleh majalah satire Prancis, *Charlie Hebdo* pada Rabu (2/9) waktu setempat, sebagai tanda dimulainya persidangan penyerangan kantor mereka, menunjukkan sikap Barat yang intoleran dan Islamofobia.

Pembelaan Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap pernerbitan kartun tersebut dengan alasan kebebasan pers, juga menguatkan betapa Barat memperlihatkan wajah berbeda dalam penentuan batas nilai kebebasan dan pembelaan HAM.

Umat Islam memiliki hak menolak praktik kebencian dan diskriminasi terhadap dirinya dan simbol yang disakralkannya. Semoga Indonesia, negara mayoritas berpenduduk Muslim, menunjukkan sikap tegas menolak tindakan intoleran terhadap Islam.

Ratih Wulan Puspita, Bogor

Antisipasi Resesi

TASMILAH, Statistisi BPS Kota Malang

Indonesia hampir dipastikan resesi pada triwulan tiga ini. Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2020, minus 2 persen dan target pertumbuhan ekonomi 2020 direvisi antara -1,1 hingga 0,2 persen.

Bukan pesimistis, tetapi realistis agar pemerintah lebih siap mengantisipasi resesi. Apalagi, rilis resmi Indonesia resesi atau tidak, baru dilakukan BPS pada awal November nanti. Resesi atau tidak, kesejahteraan penduduk harus menjadi perhatian utama.

Benar, pertaruhan masih ada satu bulan lagi di September untuk mendorong perekonomian. Normal baru dan pelonggaran aktivitas yang diharapkan mendorong konsumsi dalam negeri, hasilnya belum maksimal.

Kenyataannya, mobilitas penduduk hanya meningkat di awal Juni, memasuki Juli dan Agustus, mobilitas penduduk kembali melambat. Ini seiring melonjaknya kasus positif dan kematian pasien Covid-19 di Indonesia.

Deflasi pada Juli dan Agustus, menunjukkan daya beli penduduk tertekan. Padahal, kunci mengerek perekonomian adalah konsumsi dalam negeri yang menopang hampir 58 persen Pemerintah Indonesia.

Upaya mendorong daya beli dengan bantuan sosial tunai dan subsidi gaji, belum mampu mendorong permintaan dalam negeri. Ini karena porsi konsumsi penduduk 40 persen terbawah, hanya 17,73 persen dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Peranan terbesar justru pada penduduk kelompok pengeluaran 20 persen teratas dengan andil 45,49 persen. Sayangnya, kelompok ekonomi atas juga menahan belanjanya dan mengurangi konsumsinya dengan alasan kesehatan.

Indonesia telah mengerahkan segala sumber daya untuk menghindari resesi. Namun, hasilnya belum sesuai yang diharapkan karena faktor penyebab utamanya belum mampu dikendalikan yaitu pandemi Covid-19.

Selain konsumsi dalam negeri, kunci untuk mengerek perekonomian adalah investasi. Menurut BKPM, prospek investasi meningkat bila dibarengi kasus Covid-19 yang terkendali. Selama pandemi belum terkendali, perekonomian Indonesia juga belum akan pulih.

Demikian juga dengan modal kerja yang disalurkan perbankan turun 1,7 persen pada Juli. Lesunya kredit modal kerja ini menunjukkan rendahnya ekspansi usaha sehingga tidak ada peningkatan produksi barang dan jasa.

Berkaca pada laporan perekonomian triwulan II 2020, yang mampu tumbuh di tengah pendek, salah satunya pertanian. Namun, komoditas pertanian anjlok karena permintaan masih lesu. Akibatnya, kesejahteraan petani juga menurun.

Lesunya kegiatan restoran, rumah makan, dan menurunnya daya beli mengakibatkan menurunnya permintaan komoditas pertanian terutama produk hortikultura dan peternakan. Produksi melimpah tanpa permintaan mengakibatkan penurunan harga.



ILUSTRASI: DAAN YAHYA/REPUBLIKA

Ini terbukti pada rilis inflasi Agustus 2020, kelompok makanan memberikan andil terbesar pada deflasi Agustus. Penurunan harga pangan meringankan beban konsumen di tengah penurunan pendapatan, tetapi tak demikian bagi produsennya, yaitu petani.

Informasi permintaan dan harga pasar penting bagi petani agar berproduksi sesuai kebutuhan. Yang tak diharapkan, saat permintaan menurun lalu harga menurun, sedangkan modal yang terbatas mengakibatkan petani/peternak menurunkan produksinya.

Ketika itu, terjadi secara jamak penawaran produk pertanian menurun hingga berpotensi meningkatkan harga pangan. Inilah yang dikhawatirkan ketika pangan mengalami inflasi tinggi di tengah penurunan pendapatan dan meningkatnya pengangguran.

Karena itu, petani juga harus memperoleh perhatian. Jika pelaku UMKM memperoleh bantuan produktif Rp 2,4 juta, petani dan peternak skala kecil juga seharusnya memperolehnya agar tetap berproduksi, meskipun terjadi penurunan harga.

Berkaca pada laporan perekonomian triwulan sebelumnya, ketika konsumsi rumah tangga turun 5,51 persen, pengeluaran untuk makanan dan minuman penurunannya sangat kecil dibandingkan komponen lainnya, yaitu 0,71 persen.

Pengeluaran yang menurun tajam untuk transportasi, hotel, dan restoran/rumah makan. Artinya, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi minus atau bahkan resesi sekalipun, kebutuhan pangan penduduk tidak akan banyak mengalami penurunan.

Rencana pemerintah menambah bantuan beras 15 kg per bulan untuk penerima bantuan PKH patut diapresiasi. Demikian pula bantuan Rp 500 ribu untuk penerima program kartu sembako non-PKH. Ini upaya menjaga kesejahteraan di tengah ancaman resesi.

Resesi meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Jika pandemi belum terkendali, kegiatan produksi harus berpegang pada protokol kesehatan yang ketat. Akibatnya, kapasitas produksi tak 100 persen. Perusahaan mengurangi tenaga kerja dan menahan ekspansi.

Sehingga, tak ada penyerapan tenaga kerja baru. Padahal, angkatan kerja di Indonesia terus meningkat 1,7 juta orang setiap tahun. Fenomena lainnya, ketiadaan pekerjaan dan lesunya permintaan barang dan jasa mendorong penduduk kembali ke desa.

Karena itu, perlu sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang sifatnya padat karya. Ini penting untuk meningkatkan daya beli dan meminimalisasi dampak resesi terhadap kesejahteraan penduduk. ■



RESONANSI

■ OLEH **IKHWANUL KIRAM MASHURI**

Palestina dan Perubahan Geopolitik Timteng

Ada dua hal sering terlupakan saat membicarakan nasib bangsa Palestina. Termasuk ketika suatu negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab (UEA). Normalisasi selalu memunculkan kontroversi.

Pertama, tak ada pihak manapun, baik individu maupun negara, berhak mendikte Palestina bagaimana mengelola persoalan negara, termasuk hubungan dengan Israel.

Nasib bangsa Palestina ditentukan rakyat Palestina sendiri, melalui pemimpinnya di Gaza dan Tepi Barat, terutama otoritas yang sah di Ramallah. Kedua, seperti Palestina, setiap negara Arab mempunyai hak sama untuk mengatur hubungan internasionalnya.

Termasuk, hubungan dengan Israel. Ini masalah kedaulatan, diputuskan setiap negara atas dasar kepentingannya sendiri. Bukan berdasarkan apa yang diinginkan bangsa lain, termasuk oleh Palestina atau negara Arab lain.

Itulah tampaknya yang mendasari UEA ketika menormalisasi hubungan dengan Israel. Sebelumnya, Mesir dan Yordania menandatangani perjanjian damai dan normalisasi hubungan dengan Israel.

Lewat perjanjian damai pada 1979, Sinai dikembalikan ke Mesir, setelah diduduki Israel pada Perang 1967. Perjanjian perdamaian Yordania dengan Israel pada 1994, menyelesaikan sengketa wilayah kedua belah pihak.

Normalisasi hubungan UEA-Israel berbeda dengan Mesir dan Yordania. UEA tak berbatasan dengan Israel. Mereka tak mempunyai sengketa wilayah dan tak terlibat perang bersama negara Arab melawan Israel pada 1948, 1956, 1967, dan 1973.

Di antara negara Arab, UEA terhitung negara baru. Ia merdeka dari Inggris Raya pada 2 Desember 1971, dengan membentuk negara federasi dari tujuh Emirat, yakni Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah, dan Umm al-Qaiwain.

Seperti Negara Teluk lain, berkat minyak dan gas, UEA menjadi negara modern dengan taraf kehidupan tinggi. Normalisasi hubungan dengan Israel tampaknya akan dimanfaatkan betul oleh UEA. Kedua negara sepakat bekerja sama di berbagai bidang.

Bahkan, UEA bisa menjadi pintu ekspor produk Israel ke negara Arab dan Islam (mayoritas Muslim) yang tak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Umat Islam yang ingin mengunjungi Masjid al-Aqsha bisa pergi melalui Abu Dhabi atau Dubai.

Perjanjian damai Mesir-Israel pada 1979, mengundang kontroversi hebat. Muhammad Ibrahim Kamil mundur sebagai menlu Mesir. Ia memprotes perjanjian itu, menilainya tak adil karena tak menegaskan penarikan diri Israel dari Gaza dan Tepi Barat.

Di tingkat rakyat Arab pada umumnya, terdapat suasana frustrasi dan marah. Saat itu, mereka masih terpengaruh konsep persatuan Arab yang digagas Presiden Gamal Abdul Nasir, terutama di Mesir, Irak, Suriah, Libya, Aljazair, dan Yaman.

Lalu muncullah 'perebutan kepemimpinan regional' di antara negara Arab. Negara yang tergabung dalam Liga Arab bersidang darurat menolak perdamaian Mesir-Israel. Sebagai protes, mereka memindahkan kantor tetap Liga Arab dari Kairo ke Tunis, Tunisia.

Mesir dikeluarkan dari Liga Arab. Sepuluh negara, termasuk Organisasi Pembebasan Palestina, membentuk Jahbatu al Rafd, fron penolakan perdamaian Mesir-Israel.

Bagi Mesir yang terlibat perang langsung dengan Israel pada 1948, 1956, 1967, dan 1973, melalui perdamaian berhasil mendapatkan kembali Sinai yang diduduki Israel pada 1967. Perdamaian memberi kesempatan membangun, yang sebelumnya habis untuk perang.

Namun, perdamaian dan normalisasi hubungan Mesir-Israel dan 'berbagai peristiwa besar di Timur Tengah setelahnya', menyebabkan berakhirnya '*al-Wishayah al-Arabiyah* (perwalian negara-negara Arab) atas nasib atau persoalan bangsa Palestina.

Masing-masing negara kini memutuskan atas dasar kepentingan dalam negerinya. 'Peristiwa-peristiwa besar' itu antara lain aneksasi Irak ke Kuwait, invasi militer AS ke Irak yang berakhir pada kejatuhan Presiden Saddam Husein, juga Arab Spring.

Berbagai peristiwa besar itu mengubah geopolitik di Temur Tengah. Antara lain, menguatnya pengaruh Iran dan Turki. Iran mempunyai pengaruh kuat di Irak, Suriah, Lebonon, dan Yaman. Sedang Turki, yang dianggap pelindung Islam politik, ada di Libya, Suriah, dan Irak.

Pengaruh dua negara ini dianggap berbahaya oleh sejumlah negara Arab poros Arab Saudi-Mesir, bahkan lebih berbahaya daripada Israel. Kedua negara ini, termasuk yang menolak keras normalisasi hubungan UEA-Israel.

Perubahan geopolitik di Timur Tengah, tentu berpengaruh besar pada perjuangan dan nasib bangsa Palestina. Sejauh ini, mereka menolak keras semua normalisasi hubungan negara Arab dengan Israel, termasuk yang dilakukan UEA. ■

REPUBLIKA

Terbit sejak 4 Januari 1993, Republika hadir sebagai pelopor pembaruan media massa Indonesia. Harian ini memberi warna baru pada desain, gaya pengutaraan, dan sudut pandang surat kabar negeri ini. Sebagai koran, kemudian portal berita pertama di Tanah Air, media ini melahirkan keseimbangan baru dalam tata informasi. Republika terbit demi kemaslahatan bangsa, penebar manfaat untuk semesta.

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Semua isi artikel/tulisan yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Daerah bersangkutan.

MAHAKA GROUP

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Irfan Junaidi
Wakil Pemimpin Redaksi: Nur Hasan Murtiaji
Redaktur Pelaksana Koran: Subroto
Redaktur Pelaksana Newsroom: Maman Sudiaman
Redaktur Pelaksana Online: Elba Damhuri
Redaktur Senior: Agung P Vazza
Wakil Redaktur Pelaksana: Pirkah Fansuri, Heri Ruslan, Kumara Dewatasari, Joko Sadewo
Asisten Redaktur Pelaksana: Priyantono Oemar, Stevy Maradona, Ferry Kisihandi, Mansyur Faqih, Didi Purwadi, Muhammad Subarkah, Budi Raharjo, Edwin Dwi Putranto
Sekretaris Redaksi: Hamidah Sagaf
Perwakilan Jawa Barat: Rachmat Santosa Basarah (Kepala Perwakilan) Irfan Firrat Pribadi (Kepala Redaksi)
Perwakilan DIY - Jateng & Jatim: Haryadi B Susanto (Kepala Perwakilan) Yusuf Assidiq (Kepala Redaksi)

Wartawan Senior: Harun Husein, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Siwi Tri Puji Budiwiyati, Rakhmat Hadi Sucipto.
Kepala Desain: Sarjono. **Kepala Infografis:** Muhamad Alimmon. **Kepala Penyunting Bahasa:** Rifin Liechtiana. **Kepala Digital:** Desi Purwo Wijianto

Staf Redaksi: Alwi Shahab, Syahruddin El-Fikri, Andi Nur Aminah, Andri Saubani, Agus Yulianto, Dewi Mardiani, Endro Yuwanto, Ririyan Zamzami, Indira Rezkisari, Irwan Kelana, Iksar, Khoirul Azwar, Nashih Nashrullah, Natalia Endah Hapsari, Nidia Zuraya, Ratna Puspita, Reiny Dwinanda, R Hiru Muhammad, Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah, Yeyen Rostiyani, Yogi Ardhi Cahyadi, Abdullah Sammy, Agus Raharjo, Amri Amrullah, Ani Nursalikah, A Syalaby Ichsan, Bilal Ramadhan, Bowo Pribadi, Citra Listya Rini, Darmawan, Desy Susilawati, Djoko Suceno, Dwi Murdaningsih, Eko Widiyatno, Erdy Nasrul, Erik Purnama Putra, Esthi Maharani, Fernan Rahadi, Friska Yolandha, Ichsan Emrald Alamsyah, Lilis Sri Handayani, Arie Lukihardianti, Ita Nina Winarsih, Mohammad Akbar, Muhammad Fakhruddin, M Hafil, Nur Aini, Qommarria Rostanti, Ruddy Nurdiansyah, Satya Festiani, Setyanavidita Livikacansera, Tahta Aidilla, Wihdan Hidayat, Prayogi, Bambang Noroyono, Gita Amanda Jatmikawati, Satria Kartika Yudha, Rizky Jaramaya, Gilang Akbar Prambadi, Rr Laeny Sulistyawati, Nova Arizah, Lida Puspaningtyas, Dessy Suciati Saputri, Ratna Ajeng Tejomukti, Reja Irfa Widodo, Fuji Pratiwi, Mas Alamil Huda, Sadly Rahman, Agung Sasongko, Yudha Manggala Prian a Putra, M Amin Madani, Fian Firatmaja, Karta Raharja Ucu, Puti Almas, Rahmat Fajar, Fauzan Mursid, Ali Mansur, Melisa Riska Putri, Umi Nur Fadhilah, M Fauzi Ridwan, Ahmad Riki Noor, Eric Iskandarsyah, Kiki Sakinah, Lintar Satria Zulfikar, Elo Supriyadi, M Nursyamsi, Sapto Andika Candra, Binti Sholikah, Christyaningsih, Iit Septyaningsih, Dadang Kurnia, Adysha Citra R, Andrian Saputra, Dian Rachmawan, Febrian, Fuji Eka Permana, Hasanul Rizqa, Intan Pratiwi, Retno Wulandhari, Rossi Handayani, Umar Mukhtar, Wilda Fizriyani, Anggoro Pramudya, Santi Sopia, Wisnu Aji Prasetya, Frederikus Dominggus Bata, Wahyu Suryana, Rizkyan Adiyudha, Kamran Dikarma, Dian Erika Nugraheny, Zuli Istiqomah, Dwina Agustin, Mabruroh, Noer Qomariah Kusumawardhani, Rahayu Subekti, Rizky Suryarandika, Shelbi Asrianti, Idealisa Masyrafina, Muhyiddin, Ilham Tirta, Riga Nurul Iman, Edi Yusuf, Arif Satrio Nugroho, Febrianto Adi Saputro, Ronggo Astungkoro, Dea Alvi Soraya, Gumanti Awaliyah, Rahma Sulistya, Novita Intan, Ririanto, Rakhtar Khoiron Lubis. Adinda Pryanka, Farah Nabila Noersativa, Fergi Nadira, Hartifiany Praisra, Inas Widyanuratikah, Silvy Dian Setiawan, Zahrotul Oktaviani.

Komisaris Utama: Muhammad Lutfi
Komisaris: R Harry Zulnardy, Adrian Syarkawi, Tjuk Agus Minahasa, Agoosh Yoosran
Direktur Utama: Misi Raharidjo Djarot
Direktur Operasional: Arys Hilman Nugraha
Direktur Konten: Irfan Junaidi
Manajer Senior Keuangan, SDM, dan Umum: Ruwito Birotowidjojo
Manajer Iklan dan Pengembangan Daerah Indra Wisnu Wardhana
Manajer Produksi: Nurrokhim
Manajer Promosi dan Event: HR Kurniawan
Manajer TI: Mohamad Afif

Alamat Redaksi: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510
T. 021 780 3747 (Hunting), 021 791 84744 (Iklan)
F. 021 780 0649, 798 3623 (Redaksi), 021 798 1169 (Iklan), 021 791 98442 (Sirkulasi dan Berlangganan)
Email Redaksi Republika: sekretariat@republika.co.id.
Percetakan: PT Republika Media Mandiri Jl. Rawa Bali 2 No. 1 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta

Alamat Perwakilan:
Republika Jawa Barat: Jl. Mangga No. 47 Bandung 40114 T. 022 87243363-87243364, F. 022 87243365
Republika DIY-Jateng & Jatim: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Yogyakarta T. 0274. 544.972, 566028, F. 0274. 541.582
Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992,
Anggota Serikat Penerbit Surat Kabar: Anggota SPS No. 163/1993/11/A/2012.

Harga Berlangganan: Rp 120.000 per bulan.
Harga Eceran Pulau Jawa Rp 5.500 per eksemplar.
Harga Eceran Luar Jawa: Rp 6.000 per eksemplar (tambah ongkos kirim).

Rekening Bank a.n PT Republika Media Mandiri:
Bank BSM, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 003.011.3448
Bank Mandiri, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 127.000.424.0642
Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028.988
Bank BCA, Cab. Graha Ins Fauzi, No. Rek. 375.305.6668
Bank BNI Syariah, Cab. Fatmawati, No.. Rek. 021.159.324.0

Adu Tajam di Amsterdam

PIROSCHKA VAN DE WOUW/ REUTERS



● Tim nasional Belanda

LIMA PERTEMUAN TERAKHIR KEDUA TIM:

04/06/2018 Italia	1-1	Belanda
28/03/2017 Belanda	1-2	Italia
04/09/2014 Italia	2-0	Belanda
06/02/2013 Belanda	1-1	Italia
14/11/2009 Italia	0-0	Belanda

Belanda identik dengan sepak bola menyerang.

■ FREDERIKUS BATA

AMSTERDAM — Laga besar akan tersaji di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Selasa (8/9) dini hari WIB. Tim nasional Belanda akan menjamu Italia. Para raksasa Eropa ini tergabung dalam Grup 1 Liga A UEFA Nations League 2020/2021 alias divisi teratas turnamen anyar antarnegara Benua Biru yang memasuki penyelenggaraan kedua.

Pada *matchday* perdana, tuan rumah mampu meraih kemenangan tipis 1-0 atas Polandia. Gol tunggal De Oranje tercipta pada babak kedua melalui lesakkan Steven Bergwijn. Hasil tersebut membuat Belanda memuncaki klasemen sementara A1. "Kami mengendalikan permainan dengan baik. Tetapi kami harus bisa keluar dari situasi (kebuntuan), saat kami menempatkan bola di belakang pertahanan mereka," kata gelandang Belanda Frenkie de Jong, dikutip dari Laman resmi UEFA.

Apa yang diutarakan De Jong merupakan persoalan klasik. Belanda identik dengan sepak bola menyerang. Saat menghadapi tim yang bermain bertahan, Memphis Depay dan rekan-rekan cukup kesulitan membongkarnya. Total Belanda melepaskan 15 percobaan dan 6 tembakan tepat sasaran, tapi hanya satu gol tercipta. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pelatih sementara Dwight Lodeweges.

Ia memiliki motor serangan brilian dalam diri De Jong. Kemudian Georginio Wijnaldum, Bergwijn, dan Luuk de Jong, bahu membahu bersama Depay di garis serang. Di lini belakang, Virgil van Dijk kehilangan dua tandem idealnya. Baik Matthijs de Ligt maupun Stefan de Vrij sedang absen. Mereka memulihkan diri dari cedera masing-masing. Walhasil Van Dijk bakal kembali berpasangan dengan Joel Veltman sebagai palang pintu terakhir.

Dari skema permainan belum ada yang berubah kendati tim tersebut sudah tidak dilatih Ronald Koeman. Belanda masih mengandalkan penguasaan bola dengan pergerakan cepat di sepertiga pertahanan lawan. "Kami memainkan sepak bola terbaik dan kami melakukan pekerjaan itu dengan benar. Bagi saya pribadi, sangat senang bisa kembali ke tim," ujar Depay.

Beralih ke Italia, Azzurri gagal meraih hasil maksimal pada *matchday* perdana. Pekan lalu, Italia ditahan imbang Bosnia Herzegovina, 1-1, di Stadio Artemio Franchi. Tim asuhan Roberto Mancini bahkan tertinggal lebih dahulu. Bosnia memimpin lewat gol Edin Dzeko pada menit ke-57. Sepuluh menit berselang, Stefano Sensi menyelamatkan timnya dari kekalahan. Hasil ini membuat rentetan kemenangan Italia di kualifikasi Euro 2020 dan laga persahabatan terhenti di angka 11.

"Catatan kemenangan beruntun pasti ada akhirnya. Kami senang dengan hasil imbang, bukan kekalahan," ujar Mancini kepada *RAI Sport*, dikutip dari *Football Italia*. Belanda menunggu di depan mata.

Sang *allenatore* memastikan bakal menurunkan skuat berbeda di Amsterdam nanti. Ada beberapa penggawa senior bakal mentas sejak awal. "Kami mempertahankan struktur dasar, tapi perubahan ada di pemain. Jelas mereka tidak bisa terus bermain setiap tiga hari sekali," tutur Mancini.

Sama seperti Belanda, Italia juga kesulitan menghadapi tim yang menumpuk banyak pemain di pertahanan. Namun, situasinya berbeda. Kedua kubu selalu berinisiatif untuk menyerang. Jual beli serangan bakal terjadi di Amsterdam. ■ ed: Israr Itah

PREDIKSI *LINE UP*

BELANDA VS ITALIA



Pelajaran Pertama Timnas U-19

■ AFRIZAL ROSIKHUL ILMI

JAKARTA — Tim nasional Indonesia U-19 mengalami kekalahan telak 0-3 dari Bulgaria pada laga perdana mereka di International Friendly Tournament di Stadion Igraliste NK Polet, Sveti Martin na Muri, Medimurje, Kroasia, Sabtu (5/9) malam WIB. Pelatih Shin Tae-yong tidak terkejut dengan hasil tersebut dan memastikan ini termasuk dalam proses pembelajaran tim mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U-20 2021. Hal yang terpenting, kata dia, para penggawa timnas muda kita sudah bermain maksimal.

"Hasil pertandingan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami tidak masalah meski harus kalah. Yang jelas, tim masih berproses karena materi latihan dengan intensitas tinggi dan para pemain sudah menunjukkan kerja keras nya di pertandingan ini," kata Shin, dikutip dari laman resmi PSSI, Ahad (6/9).

Pengamat sepak bola Eko Noer Kristianto mengatakan, kekalahan telak yang diterima skuat Garuda Muda adalah hal positif. Terlebih, kata dia, Shin sudah berpesan agar jangan terlalu berharap dengan hasil akhir laga itu. Artinya, lanjut Eko, pelatih berusia 51 tahun itu sejak awal tidak mencari kemenangan, melainkan ingin melihat kemampuan sekaligus kelemahan dari para pemainnya.

"Artinya memang ada hal lain yang dicari. Saya *enggak* bilang timnas jadi bagus, tapi berarti STY telah berhasil menakar kemampuan timnya," kata Eko saat dihubungi *Republika*, Ahad (6/9).

Setelah melawan Bulgaria, Garuda Muda akan menantang Kroasia pada 8 September dan Arab Saudi pada 11 September. Selain mengikuti turnamen tersebut, skuat Garuda Muda juga akan melawan Qatar, Bosnia dan Herzegovina, serta Dinamo Zagreb selama melaksanakan pemusatan latihan (TC) di Sveti Martin na Muri, sekitar 120 km dari Ibu Kota Zagreb.

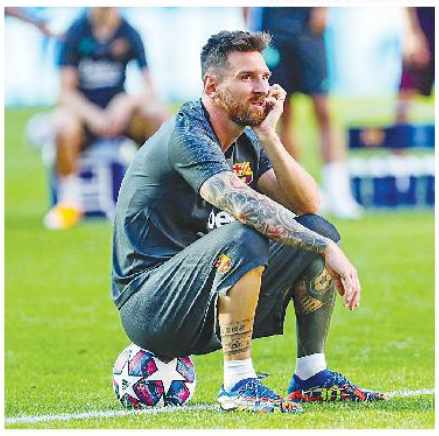
Eko mengaku tidak menaruh harapan lebih mengenai hasil pertandingan. Dia menilai yang terpenting adalah para pemain bisa terus mengembangkan kemampuan mereka selama TC berlangsung. "Jadi, *enggak* ada istilah keadaan tim sama saja, harus lebih baik setiap menit, setiap jam, setiap hari," ujarnya tegas.

Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali menambahkan, kekalahan tersebut mengecewakan. Namun, dia mengakui, pertandingan uji coba itu belum bisa dijadikan ukuran. Menurut dia, Shin masih berfokus pada pengembangan fisik pemain. "Para pemain kelihatan sekali kakinya berat digerakkan karena sudah terkuras di latihan fisik," kata Akmal saat dihubungi.

Ia menilai pola permainan, skema, taktik, dan kerja sama tim juga belum terlihat. Menurut Akmal, Shin belum masuk ke program tersebut. Masih fokus soal fisik dan gizi serta pembenahan teknik para pemain.

Kendati demikian, menurut Koordinator Save our Soccer (SOS) itu, hal-hal yang menyebabkan tiga gol bersarang di gawang Indonesia bisa jadi bahan evaluasi. Dia menilai kelemahan timnas Indonesia dari junior hingga senior adalah dalam mengantisipasi bola-bola mati. ■ ed: Israr Itah

FC BARCELONA VIA/LATIN AMERICA REUTERS



BERTAHAN Lionel Messi mengumumkan bertahan di Barcelona selama semusim ke depan setelah sebelumnya sempat mengirimkan surat ke manajemen klub untuk keluar.

Pembalasan Raptors dan Nuggets

■ FITRIANTO

FLORIDA — Dua tim sukses melakukan revans terhadap lawan-lawannya pada babak semifinal wilayah NBA di Orlando, Florida, Ahad (6/9). Di Wilayah Timur, Toronto Raptors menyamakan kedudukan 2-2 kontra Boston Celtics. Di Wilayah Barat, Denver Nuggets kini mengimbangi Los Angeles Clippers 1-1.

Juara bertahan Toronto Raptors yang sempat tertinggal 0-2, mampu menyamakan kedudukan 2-2 setelah mengalahkan Boston Celtics, 100-93, di gim keempat. Sedangkan, Nuggets tampil perkasa saat membungkam Clippers, 110-101, pada gim kedua semifinal Wilayah Barat.

Tidak perlu tembakan besar kali ini, seperti saat laga Raptors dua hari lalu, yang memenangkan gim ketiga dengan tembakan tripoin OG Anunoby saat waktu tinggal 0,5 detik. Kali ini, tim asuhan Nick Nurse sukses menutup sebagian besar penembak perimeter Boston, khususnya Jaylen Brown.

"Saya pikir kami selalu bisa naik ke level lain," kata Pascal Siakam yang menyumbang 23 poin dan 11 *rebound* untuk Raptors, seperti dilansir *AP*.

Jaylen Brown yang hanya sukses melesakkan dua tripoin dari 11 percobaan mengakui, Celtics tidak bermain baik kali ini. "Kami harus bangkit kembali dan bersiap untuk bertarung. Itulah yang terjadi," kata dia.

Total Celtics hanya berhasil memasukkan tujuh tripoin dari 35 usaha atau hanya 20 persen. Brown melewatkan sembilan upaya pertamanya di belakang busur. Tatum, Walker, dan Marcus Smart semuanya hanya mampu memasukkan satu dari enam percobaan tripoin. Pelatih Nick Nurse berasumsi Raptors akan segera berfokus kembali setelah euforia kemenangan itu, mengingat betapa bagusnya mereka bermain dalam istirahat singkat.

Sementara Nuggets sukses revans terhadap Clippers. Setelah pada gim pertama kalah 97-120, mereka sukses membalas 110-101 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. "Kami tim yang sangat berbeda, itu menyebabkan hasil yang sangat berbeda juga," jelas Malone dilansir dari laman AP.

Jamal Murray mencetak 27 poin, Nikola Jokic menyumbang 26 poin dan 18 *rebound*. Gary Harris dan Paul Millsap masing-masing menambah 13 poin untuk Denver.

Murray mengatakan, timnya kelelahan saat kalah pada gim pertama. Itu tidak terjadi pada gim kedua ini. Murray dan Jokic melesakkan 20 dari 38 percobaan. Sedangkan, untuk tripoin, Nuggets memasukkan 7 dari 13 usaha. ■ ed: Israr Itah

HASIL LENGKAP PLAY-OFF NBA AHAD (6/9)

1.	Raptors	100-93	Celtics	2-2
2.	Nuggets	110-101	Clippers	1-1

JADWAL SENIN (7/9) WIB

04.30	Heat	vs	Bucks	3-0
07.30	Rockets	vs	Lakers	1-0

TITIK PUTIH

Menguji Fokus Shin Tae-Yong

■ OLEH **RAHMAT FAJAR**

Menjadi pelatih tim nasional Indonesia sudah barang tentu harus mempunyai mental baja. Bukan hanya untuk menghadapi tekanan karena target yang dipatok oleh federasi, melainkan juga ganasnya hujatan suporter sepak bola Indonesia yang belum bisa menerima kekalahan tim secara legawa.

Pelatih timnas Indonesia Shin Te-Young tentu sudah tahu itu. Sebelum menerima pekerjaan di Indonesia, Shin bisa diprediksi sudah punya sejumlah data bagaimana fanatiknya suporter Indonesia dan tahu apa dampaknya kepada dia.

Tapi, perlu diingat, Shin bukan pesulap yang bisa mengubah wajah timnas tampil luar biasa dan meraih kemenangan di setiap laga secepat kilat. Meski pelatih berlabel kelas Piala Dunia, ia tetap butuh proses. Menyeleksi pemain, menggembleng pemain mulai dari teknik dasar, fisik, dan mental itu membutuhkan waktu. Maka dari itu mungkin dalam beberapa pertandingan ke depan timnas akan mengalami kekalahan karena mereka sedang dalam tahap pengembangan.

Shin harus fokus menggembleng timnas. Tak terganggu dengan suara sumbang suporter Indonesia yang mulai muncul lebih kencang setelah timnas U-19 kalah 3-0 dari Bulgaria dalam turnamen persahabatan di Kroasia, Sabtu (5/9) malam WIB.

Kekalahan itu membuat kritikan mengenai cara Shin melatih pun bertebaran di media sosial. Membanding-bandingkan Shin dengan pelatih sebelumnya satu di antara kecaman yang muncul di lini masa.

Saya berpendapat suara sumbang tersebut sesuatu yang wajar dalam dunia sepak bola. Shin hanya perlu menganggap itu cara suporter memberikan semangat kepada dia dalam menggodok timnas yang tangguh. Sebab, jika itu tak ditanggapi dengan kepala dingin, bisa dipastikan pelatih asal Korea Selatan tersebut tak akan lama menukangi skuat Merah Putih.

Shin baru memulai debutnya melawan Bulgaria. Ia sudah mengatakan sebelum laga bahwa kekalahan mungkin akan didapatkan. Menurut Shin, butuh proses membentuk timnas yang tangguh. Ia juga meminta kepada suporter Indonesia agar bersabar.

Saya sependapat dengan kata-kata Shin. Tak ada yang instan di dalam sepak bola. Seluruhnya membutuhkan proses panjang. Indonesia bukan Spanyol atau Inggris di mana liga mereka sudah diakui di dunia. Akademi yang dikelola klub mempunyai sistem yang bagus sehingga pelatih timnas tak kesulitan mencari pemain berkualitas.

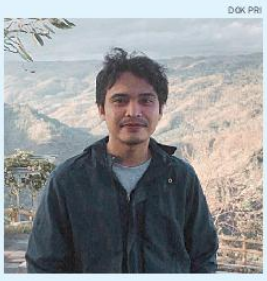
Sedangkan, di Indonesia, akademi sepak bola yang didukung fasilitas penunjang memadai sangat minim. Dampaknya adalah kemampuan teknis, fisik, dan mental pemain Indonesia jauh di bawah rata-rata pemain di negara yang sepak bolanya maju.

Oleh karena itu, tak mengherankan jika Shin mengawali pekerjaanya sebagai pelatih dengan menggenjot fisik, mental, dan teknik dasar bermain sepak bola. Shin menilai kemampuan teknis mereka perlu diperbaiki. Itu sebabnya Shin tak terburu-buru masuk ke materi taktik dan strategi.

Spanyol salah satu contoh bahwa mencapai puncak membutuhkan proses panjang. Sebelum negeri Matador itu menjuarai Piala Eropa 2008, 2012, dan Piala Dunia 2010, prestasi tim sepak bola mereka di pentas dunia masih di bawah Italia, Prancis, dan Inggris. Mereka berjuang dari bawah dengan meningkatkan kualitas akademi dan dukungan fasilitas penunjang.

Di Spanyol ada akademi yang selalu mencetak pemain-pemain berkualitas, seperti akademi Fabrica milik Real Madrid dan La Masia punya Barcelona. Dua akademi tersebut menyumbang hampir semua anggota timnas Spanyol hingga saat ini. Dari Barcelona dan Real Madrid, timnas Spanyol menjelma sebagai kiblat sepak bola dunia dalam beberapa tahun terakhir.

DOK PRI



Shin punya tugas berat. Dia diberikan tanggung jawab menjadi pelatih timnas senior dan timnas U-19 untuk persiapan Piala Dunia U-20 di Indonesia tahun depan. Mereka yang kini sedang *training camp* di Kroasia adalah cikal bakal skuat Piala Dunia nanti.

Pertanyaannya, apakah Shin kuat menghadapi suara sumbang jutaan suporter Indonesia dalam beberapa bulan ke depan? Apakah ia tetap bertahan dengan keyakinannya bahwa kesuksesan butuh proses sehingga tak memengaruhi metode melatihnya? ■ ed: Israr Itah

WIHDAN HIDAYAT/REPUBLIKA



PARIWISATA Wisatawan mengunjungi kawasan wisata baru Svargabumi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Ahad (6/9). Spot wisata di tengah sawah dengan konsep instagramable ini viral dan ramai dikunjungi wisatawan. Dengan tiket masuk Rp 25 ribu wisatawan bisa berkeliling dan berfoto di lokasi yang bertempat di selatan Candi Borobudur ini. Di sini wisatawan disuguhi pemandangan dan fasilitas seperti di Pulau Bali.

Arak-arakan tak Relevan

KPU didesak segera melakukan mitigasi tahapan-tahapan pilkada berikutnya.

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khorunnisa Nur Agustyati menyoroti adanya arak-arakan dan mobilisasi massa dalam proses pendaftaran calon kepala daerah. Menurut dia, perlu ada kesadaran dari peserta pemilu agar tidak muncul klaster penyebaran Covid-19.

"Menurut saya, sebetulnya mungkin arak-arakan massa itu ingin menunjukkan bahwa paslon ini didukung sekian banyak orang. Namun, dalam kondisi seperti ini justru itu adalah hal yang tidak relevan. Bahwa didukung oleh sekian banyak orang justru menunjukkan ya tidak tertib protokol kesehatan dan justru membahayakan," kata Khoirunnisa dalam seminar daring, Sabtu (5/9).

Khoirunnisa mengatakan, penting juga bagi penyelenggara pemilu untuk menjamin keselamatan pemilih. Selain harus memastikan agar partisipasi pemilih tidak turun, penyelenggara pemilu juga harus menjadi agen kesehatan.

"Artinya, penyelenggara pemilu ini menjadi *double* beban kerjanya, jadi ganda. Bahwa selain menggelar pilkada di tengah pandemi, tapi menurut saya penyelenggara pemilu itu juga harus menjadi agen kesehatan."

Ia menambahkan, penyelenggara pemilu juga harus menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 belum selesai, bahkan trennya justru meningkat dan penularan bisa sangat cepat. Sehingga, dia menyebut, tahapan pemilu tidak bisa dilakukan kalau ada kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.

"Kalau ada arak-arakan massa ya tidak bisa. Itu harus dihindari karena tidak sesuai protokol kesehatan. Jadi, itu juga yang harus disampaikan oleh penyelenggara pemilu," katanya.

Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) memandang, pendaftaran calon/peserta Pilkada 2020 yang digelar hingga Ahad (6/9) berpotensi memunculkan klaster baru penularan Covid-19. "Bahkan di Surabaya terlihat jelas adanya adu dorong antara pendukung calon dan pihak Polri yang mengamankan proses pendaftaran calon tersebut," kata Direktur Puskapol UI Aditya Perdana dalam keterangan tertulis yang diterima *Republika*.

Tidak hanya di Surabaya, Aditya menyebut, salah satu calon kepala daerah di Tangerang Selatan merasa tidak bertanggung jawab atas adanya mobilisasi massa pendukungnya meski timnya sudah memberitahukan adanya batasan kehadiran di KPU. "Inilah ironi yang sedang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi Covid-19 yang sedang dalam masa puncak penularan secara nasional," ujarnya.

Karena itu, Puskapol UI meminta KPU mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran Pilkada 2020 di 270 daerah dengan memperhatikan aspek protokol kesehatan sebagai bahasan evaluasi yang utama. Evaluasi tersebut perlu dilakukan bukan hanya dalam proses formal yang ada di dalam kantor KPU, melainkan juga mengevaluasi proses di luar arena, seperti arak-arakan, mobilisasi massa, ataupun orasi para calon kepada pendukungnya. "Evaluasi ini tentu harus melibatkan semua pihak utama yang terlibat dalam proses pencalonan tersebut," ujarnya.

Aditnya mengatakan, Puskapol UI mengecam keras tindakan mobilisasi massa yang dilakukan oleh para calon/kandidat Pilkada 2020. Puskapol UI mendukung bahwa Polri memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan pembubaran massa apabila telah melewati batas jumlah orang yang sudah ditentukan oleh KPUD dalam proses pendaftaran tersebut.

Untuk menciptakan situasi yang persuasif, para calon peserta pilkada dan tim suksesnya diimbau untuk mendukung langkah tegas Polri dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Selanjutnya Puskapol UI juga mendorong agar KPU dapat mewajibkan adanya daftar hadir seluruh orang yang berada di dalam ruang ataupun di luar ruangan kantor KPU. Hal itu penting untuk antisipasi dan tracing awal penyebaran kasus Covid 19 di daerah tersebut.

"Tentu saja pihak partai politik dan kandidat/calon harus dapat menunjukkan tanggung jawabnya dalam melakukan *tracing* tersebut nantinya apabila terbukti adanya klaster penyebaran virus akibat kerumunan massa dalam pencalonan Pilkada 2020," ujar dia.

Aditya menambahkan, Puskapol UI juga mengimbau agar Satgas Covid-19 di 270 wilayah dapat memulai koordinasi dengan KPU terkait mitigasi dan pelacakan awal dalam penyebaran virus Covid-19.

Puskapol UI juga meminta agar KPU segera melakukan mitigasi dalam tahapan-tahapan berikutnya yang berpotensi adanya pengumpulan massa yang dilakukan oleh para peserta pilkada.

"Untuk itu, KPU RI seharusnya dapat memimpin adanya simulasi-simulasi yang melibatkan semua pihak sebagai langkah penting dalam antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang lebih luas ke depannya," katanya.

■ **ed:** fitriyan zamzami

Agar tak Lagi Kekeringan

Beberapa wilayah di Indonesia tercatat mulai kerap mengalami kekeringan sejak 10 tahun terakhir. Kondisi yang sebetulnya tidak perlu terjadi, mengingat curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk kategori tinggi.

Bahkan, beberapa wilayah termasuk daerah *semi arid* (semikering), seperti sebagian Bali timur, NTT, NTB, dan lembah Palu. Akan tetapi, hujan kumulatif tahunannya masih termasuk sedang (700-800 mm/tahun).

Secara temporal, bulan kering juga relatif tidak lama, sekitar 3-4 bulan. Walaupun kondisi daerah *semi arid* juga berbeda, karena bulan keringnya 6-7 bulan. Sedangkan yang harus diwaspadai adanya peningkatan bencana kekeringan baik sebaran spasial maupun jangka waktunya (temporal).

Makin bertambah banyak daerah yang berdasarkan peta indeks kelangkaan air (*water scarcity index*) masuk kategori *stressed*, yaitu air yang tersedia hanya mampu memenuhi kebutuhan 1.000-2.000 meter kubik per kapita per tahun. Kian banyak juga daerah yang mengalami langka ekstrem (*severely scarce*) yang hanya mampu memenuhi kebutuhan 1.000-2.000 meter kubik per kapita per tahun. Sementara, ambang batas untuk kategori normal adalah 2.000 meter kubik per kapita per tahun.

Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti Nurbaya menyatakan, kondisi tersebut makin menurunkan peluang akses ke air bersih, di samping kemampuan dalam menafsirkan berbagai fenomena yang menjadi dasar dalam mengambil tindakan/keputusan.

"Saat ini kita sering melihat adanya fragmentasi program penanganan bencana kekeringan yang dilakukan multisektor, padahal vektornya sama, yaitu ketahanan air dan pangan," ujar dia dalam rilis yang diterima *Republika*, kemarin.

Menurut dia, tata kelola bentang alam adalah pendekatan yang paling memadai untuk merajut berbagai strategi yang diinisiasi. Pemanfaatan instrumen *geographical information system* (GIS) menjadi kebutuhan agar sinergi program terformulasikan secara akuntabel sehingga strategi yang dihasilkan memiliki tingkat akseptabilitas tinggi.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) KLHK Helmi Basalamah mengatakan, kekeringan itu sebetulnya tidak perlu terjadi, mengingat curah hujan di hampir seluruh wilayah kita termasuk kategori tinggi.

Karena itu, Kementerian LHK menggelar sosialisasi kebijakan *water balance* dan pelatihan jarak jauh analisis spatio-temporal neraca air untuk mitigasi bencana dengan *e-learning* kepada para pemangku kebijakan baik di pusat maupun daerah. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan peserta mampu menganalisis hujan dan proses hidrologi, menganalisis ketersediaan air permukaan dan air tanah, menjelaskan *land form*/bentuk lahan dan potensi sumber daya air, menganalisis kebutuhan air, menganalisis neraca air, dan melakukan paparan hasil identifikasi neraca air.

■ antara **ed:** fitriyan zamzami



ANALISIS

■ OLEH **IMAN SUGEMA**

Pemulihan Ekonomi *ala* Paul Krugman

Beberapa waktu yang lalu, Paul Krugman, salah satu peraih Nobel bidang ekonomi memberikan gambaran yang sangat optimistis tentang pemulihan ekonomi. Ia menyebut ekonomi akan cepat pulih pasca-pandemi Covid-19.

Alasannya sangat sederhana, yaitu resesi global terjadi bukan akibat kelemahan struktural. Perusahaan tidak beroperasi karena terpaksa atau dipaksa ditutup oleh kebijakan *lockdown* dan *social distancing*. Konsumen berhati-hati dalam membelanjakan uang karena belum ada kepastian kapan mereka akan bekerja kembali.

Konsekuensinya, ketika perusahaan dapat beroperasi secara normal, aktivitas ekonomi akan kembali seperti biasa. Mungkin beberapa aktivitas seperti pelayanan *online* akan menjadi lebih maju. Sementara, sebagian lagi mungkin akan meredup. Akan tetapi, secara keseluruhan, aktivitas ekonomi akan bangkit secara mudah.

Argumen seperti ini tentunya memerlukan beberapa kualifikasi. Pertama dan yang paling utama adalah kepastian tentang solusi permanen terhadap pandemi Covid-19. Wabah akan berakhir dengan sendirinya jika dua pertiga penduduk dunia telah divaksinasi. Hanya dengan demikian kita semua bebas berinteraksi sosial, bepergian ke mana saja kita mau, dan bekerja seperti biasanya.

Presiden Joko Widodo sendiri memberi target bahwa vaksinasi akan dimulai pada awal 2021. Kalau benar, vaksinasi massal akan membutuhkan waktu sekitar setengah tahun. Tentunya kita semua harus sabar menunggu antrean. Vaksin perlu diproduksi secara massal, didistribusikan, dan disuntikkan. Semua itu tentunya memerlukan waktu.

Vaksinasi massal bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Akan ada pihak-pihak yang menolak untuk divaksin. Beberapa pihak akan secara sengaja melakukan propaganda palsu dengan berbagai alasan, seperti agama, kepercayaan terhadap kandungan vaksin, dan lain sebagainya. Akan ada pihak yang mengisukan bahwa vaksin mengandung komponen haram.

Untuk kasus Indonesia, mungkin isunya akan sedikit lebih rumit. Beberapa pihak memang sejak awal tidak mudah kooperatif dengan kebijakan pemerintah. Bukan tidak mungkin akan ada yang mengaitkannya dengan isu komunisme. Akan tetapi, memang tidak semua orang harus mendapatkan vaksin.

Boleh saja satu pertiga penduduk tidak divaksin dan mendapatkan kekebalan secara kelompok. Mereka terlindungi dari wabah bukan karena dirinya kebal, melainkan karena wabah tidak mudah mencari mangsa.

Vaksinasi juga mungkin akan menjadi masalah besar bila kualitasnya tidak terjaga. Produksi massal dengan waktu yang sangat singkat biasanya berasosiasi dengan kesulitan untuk menjaga konsistensi kualitas. Beberapa pihak mungkin akan memanfaatkan kesempatan bisnis dengan cara curang, seperti pemalsuan dan pengenceran.

Bisa jadi kita juga terlalu tergesa-gesa dari awal sehingga terjadi kesalahan dalam memastikan kemujaraban vaksin yang diedarkan. Pastinya tahun depan adalah tahun di mana keandalan pemerintah dalam pengorganisasian logistik kesehatan akan betul-betul diuji.

Kualifikasi yang kedua adalah sejauh mana Covid-19 telah menimbulkan kerusakan ekonomi. Krugman sendiri mengasumsikan kerusakan tidak bersifat permanen atau hanya sementara. Perusahaan berhenti beroperasi bukan karena mereka bangkrut secara teknis. Mereka tutup karena situasi tidak memungkinkan.

Bahkan di beberapa negara yang sudah sukses dengan *lockdown*, relaksasi aktivitas produksi dilakukan secara berhati-hati. *Lockdown* tidak meniadakan kemungkinan berjangkitnya *second wave*. Sampai sekarang belum ada satu pun negara yang bisa kembali normal. Bahkan, mayoritas ekonom di Amezrika Serikat dan Inggris berpendapat bahwa *lockdown* merupakan langkah yang terlalu berlebihan sehingga menimbulkan beban ekonomi yang terlalu besar. Akibatnya semua pemerintahan melakukan ekspansi fiskal yang *jor-joran* untuk menyelamatkan perekonomian. Berbagai paket stimulus dan penyelamatan digulirkan dengan cara menggelontorkan likuiditas.

Indonesia sendiri mungkin sedikit agak beruntung karena tidak melakukan *lockdown* secara ekstrem. Ini berarti kerusakan ekonomi yang timbul mungkin saja lebih ringan. Akan tetapi, ini baru akan kita ketahui setelah data statistik tentang produk domestik bruto (PDB), pengangguran, dan kemiskinan keluar. Perkiraan sementara *sih* tidak akan separah Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Argumentasi yang dikembangkan Krugman memberikan sebuah nuansa bahwa bisa jadi situasi ekonomi dunia tidak separah yang kita perkirakan. Terkadang pesimisme yang terlalu berlebihan justru yang menjadi penyebab kita sulit *move-on*. Sekarang pilihan ada di tangan kita: mau *move-on* atau tidak? ■

Potensi Kekeringan Terus Meningkat ..... dari hlm 1

Penyebab lainnya adalah pola aliran udara yang masih berupa aliran udara timuran dari Australia yang kering. "Sehingga potensi hujan di wilayah-wilayah, (seperti) NTT, NTB, Bali, dan Jawa Timur belum banyak," kata Mulyono ketika dikonfirmasi *Republika*, Ahad (6/9).

Dampak kekeringan makin terasa oleh warga. Utamanya warga butuh air bersih karena sumber air mereka makin menyusut. Pemerintah Kabupaten Semarang mulai menyiapkan sekitar 500 tangki atau setara 2,5 juta liter air bersih sebagai bentuk antisipasi terhadap bencana kekeringan. Kendati dampak musim kemarau belum meluas di daerah ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mulai memetakan wilayah yang diperkirakan bakal terdampak terlebih dahulu.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Semarang Heru Subroto menyampaikan, Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, menjadi wilayah yang paling rawan terhadap dampak kekeringan.

"Baru-baru ini BPBD Kabupaten Semarang telah mendistribusikan bantuan air bersih satu tangki berkapasitas 5.000 liter untuk desa tersebut," ujar Heru melalui sambungan telepon, Ahad (6/9).

BPBD Kabupaten Semarang, dia melanjutkan, juga mewaspadai dampak musim kemarau yang ada di wilayah desa lain, baik yang ada di kecamatan Pringapus maupun kecamatan lain di wilayah Kabupaten Semarang. Berdasarkan pengalaman musim kemarau tahun-tahun sebelumnya, bencana kekeringan memang berpotensi terjadi di wilayah kecamatan lain di Kabupaten Semarang, seperti di wilayah Kecamatan Bancak, Suruh, dan sebagian wilayah Kecamatan Bringin. Khusus di wilayah Kecamatan Bancak dan Suruh setidaknya ada 12 desa yang rawan terdampak musim kemarau.

Heru berharap dampak musim kemarau tahun ini tidak separah musim kemarau tahun lalu. "Sehingga persediaan bantuan air bersih yang disiapkan BPBD Kabupaten Semarang tetap mencukupi," ujar dia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Jawa Barat juga mencatat bahwa bencana kekeringan di wilayahnya berdampak pada 13 desa mencakup 17.378 keluarga atau 54.194 warga. Berdasarkan pemetaan di lapangan, sembilan kecamatan yang terdampak kekeringan itu adalah Citeureup, Jasinga, Tenjo, Cariu, Ciampea, Cigudeg, Klapanunggal, Jonggol, dan Gunungputri.

Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani di Cibinong, Kabupaten Bogor, mengatakan, mengerahkan empat armada mobil tangki yang masing-masing berkapasitas 5.000 liter untuk mendistribusikan air bersih. Pihaknya juga mengimbau kepada pemerintah wilayah baik desa maupun kecamatan untuk segera mungkin bersurat ke BPBD jika terjadi musibah kekeringan di wilayahnya.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mencatat ada sekitar 302 hektare lahan di wilayahnya yang terancam gagal panen karena dilanda musim kemarau.

Kepala Harian BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan, di Jawa Barat yang sudah terdampak adalah Kabupaten Bandung. Sebanyak 112 ribu liter air bersih telah dikirimkan ke desa terdampak di dua wilayah itu.

Meski sudah ada laporan dari beberapa daerah terkait kebutuhan air, Dani menyebut, angka sebaran kekeringan belum tinggi. Jadi, hanya beberapa rukun warga di perkampungan, belum meluas satu desa atau kecamatan. "Belum ada yang sampai satu kecamatan," kata dia.

BPBD Jabar sudah rutin menyiagakan keberadaan tangki air ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih. "Tangki-tangki kita sudah tersebar di kabupaten/kota," katanya. Sedangkan untuk daerah yang mengalami kesulitan air bersih dengan durasi panjang, kata Dani, pihaknya juga menyiapkan upaya pipanisasi. Mitigasi ini diberikan pada desa yang betul-betul tidak memiliki sumber air terdekat. "Mereka yang sumber airnya kurang dari lima kilo kita bisa pakai proyek pipanisasi," kata dia.

BPBD Kabupaten Lebak, Banten, juga mencatat 30 desa yang tersebar di 16 kecamatan di daerah ini masuk kategori rawan kekeringan akibat kemarau yang terjadi awal Agustus 2020. "Kami siap mendistribusikan air bersih jika warga mengalami kesulitan air akibat kekeringan ini," kata Plt Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Lebak Ajis Suhendi di Lebak.

Pengalaman tahun-tahun lalu tercatat 30 desa tersebar di 16 kecamatan masuk kategori rawan kekeringan jika terjadi musim kemarau. Ke-16 kecamatan itu adalah Kecamatan Cimarga, Karanganyar, Cibadak, Warunggunung, Sajira, Muncang, Maja, Cirinten, Cileles, Banjarsari, Wanasalam, Cihara, Bayah, Cikulur, Cilograng, dan Leuwidamar. Daerah-daerah rawan kekeringan hingga mengakibatkan kesulitan air bersih berada di lokasi dataran tinggi.

Menurut Ajis Suhendi, warga mengalami kesulitan air bersih karena berbagai faktor. Di antaranya belum tersentuh jaringan pelayanan PDAM juga menipisnya ketersedian air bawah tanah yang menyebabkan sumur tidak mengeluarkan air.

■ antara/arie lukihardianti **ed:** fitriyan zamzami

JADWAL **SHALAT**
Bandung -3 mnt, Yogyakarta -14 mnt Semarang-14, Surabaya-24 mnt, Jambi+13 mnt, Padang +26, Medan +33 mnt, Makassar -24 mnt

SUBUH	04.35
ZHUHUR	11.53
ASHAR	15.10
MAGHRIB	17.54
ISYA	19.03

BAYU ADJI P/REPUBLIKA



GO DIGITAL Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) saat menghadiri acara milad ke-115 Pondok Pesantren Suryalaya di Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (5/9). Kang Emil meminta seluruh pesantren di wilayah provinsi tersebut untuk *go digital*, yakni memanfaatkan teknologi digital di berbagai sektor. Ia mencontohkan pertanian yang sering dinilai sebagai salah satu sektor yang tidak terdampak pandemi Covid-19.

Sertifikasi Penceramah Tuai Respons

Kemenag menampik bila program ini dinilai sebagai filterisasi dai pro pemerintah.

■ ROSSI HANDAYANI, ZAHROTUL OKTAVIANI

JAKARTA — Program penceramah bersertifikat yang digagas Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan beragam tanggapan. Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad menilai program tersebut hanya pantas diterapkan bagi dai yang menerima gaji dari negara. Adapun mubaligh yang berada di luar jalur formal dipandang tidak perlu mengikuti sertifikasi demikian.

"Ya sertifikasi penceramah itu cocok bagi penceramah formal yang digaji negara, seperti penyuluh agama atau tokoh agama yang berstatus PNS (pegawai negeri sipil)," ujar Dadang saat dihubungi *Republika*, Ahad (6/9).

Ia mengatakan, penceramah yang berasal dari organisasi masyarakat (ormas) Islam atau swadaya semestinya tidak diwajibkan untuk menjalani program itu. Pasalnya, dia melanjutkan, pada dasarnya dakwah merupakan panggilan agama untuk orang-orang yang berilmu. Ada atau tidaknya sertifikat dari negara tidak menghalangi seseorang untuk menyampaikan pengetahuan agama kepada jamaah.

"Sebagai perintah agama untuk saling menasihati atau berwasiat dalam kebenaran. Tidak usah punya sertifikat," ucap dia.

Ustaz Abdul Somad (UAS) mengatakan, program penceramah bersertifikat tidak urgen untuk dilakukan. Bahkan, hal itu cenderung akan menimbulkan kontroversi di tengah umat Islam. Ia berharap Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dapat lebih bijak dalam mengeluarkan suatu isu.

Lebih lanjut, ia menyarankan Menag agar mencontoh program-program yang pernah dijalankan beberapa pucuk pimpinan Kemenag masa silam. Sebagai contoh, mantan menteri agama Muhammad Maftuh Basyuni. UAS mengenang menteri pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pernah mengadakan tes seleksi calon dosen PNS di Mesir dan Maroko.

Dengan begitu, pemerintah melakukan "jemput bola" untuk merekrut alumni dari berbagai perguruan tinggi terkemuka Timur Tengah. Mereka yang lolos selanjutnya ditugaskan di sejumlah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dari Sabang sampai Merauke.

"Semoga Pak Fachrul Razi meninggalkan legasi yang dikenang abadi hingga akhir zaman daripada mengurus program-program 'kacang-kacang' yang kontroversial," ujar mubaligh kelahiran Asahan, Sumatra Utara, itu kepada *Republika*, kemarin.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, program penceramah bersertifikat dapat diikuti 8.200 orang dai pada tahap awal. Selain itu, ia menekankan, program ini akan dilaksanakan secara kolaboratif. Pihaknya berperan sebagai koordinator sekaligus fasilitator.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) akan dilibatkan untuk memberikan materi-materi penguatan tentang aspek ketahanan ideologis. Adapun peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diperlukan untuk berbagi informasi tentang pelbagai fenomena aktual di Tanah Air maupun mancanegara.

Sementara itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam program ini berperan memberikan pemahaman tentang Pancasila serta hubungan antara agama dan negara. Terakhir, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas keagamaan disertakan sebagai lembaga yang otoritatif dalam hal penguatan bidang keislaman.

"(Program ini) bukan sertifikasi penceramah, tetapi penceramah bersertifikat. Jadi, tidak berkonsekuensi apa pun," ucap Kamaruddin Amin saat dihubungi *Republika*, kemarin.

Pihaknya menampik bila ada anggapan program ini diasosiasikan sebagai upaya menjaring dai-dai yang pro pemerintah. Ia menegaskan, penceramah bersertifikat merupakan arahan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang juga menjabat sebagai ketua umum MUI.

"*Enggaklah* (diasosiasikan sebagai filter dai pro pemerintah – Red). Program ini hanya untuk memberi bekal kepada penceramah tentang dua hal. Pertama, pemahaman wawasan kebangsaan dan kedua tentang moderasi beragama," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI KH Ahmad Zubaidi mengatakan, program dai bersertifikat sebaiknya dilakukan MUI karena lebih independen. Ia mengaku khawatir bila Kemenag yang melakukannya akan muncul istilah dai pemerintah.

"Yang kompeten dan independen dalam menjalankan program standardisasi kompetisi dai adalah MUI yang menjadi tempat berkumpulnya puluhan ormas Islam," ucap Kiai Ahmad. ■ **ed:** hasanul rizqa

Hukum Menghadiahkan Pahala Baca Alquran

■ OLEH **RATNA AJENG TEJOMUKTI**

Alangkah baiknya bila seorang Muslim berniat untuk mengirimkan kebaikan-kebaikan kepada saudara seimannya yang telah meninggal dunia. Sebab, di alam barzakh yang berguna bagi sang almarhum atau almarhumah bukan lagi harta benda atau segala pernak-pernik duniawi, melainkan pahala kebajikan.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhammad Cholil Nafis mengatakan, salah satu cara untuk mewujudkan niat itu ialah berdoa atau menghadiahkan pahala membaca Alquran. Menurut dia, pahala amalan itu—atas izin Allah Ta'ala—akan sampai kepada orang yang telah wafat.

Hal itu berdasarkan tafsirannya atas hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."

"Anak saleh dalam hal ini bukan hanya anaknya sendiri, tetapi bisa juga orang-orang yang saleh yang kemudian mendoakannya yakni si orang yang wafat itu," ujar Kiai Cholil kepada *Republika*, Ahad (6/9).

Ia menerangkan, Rasulullah SAW sendiri dalam berbagai kesempatan mencontohkan adab berdoa untuk mengharapkan kebaikan bagi seorang yang sudah meninggal dunia.

Seperti diriwayatkan ad-Dailami, beliau bersabda, "Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang tepercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk para ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah untuk mereka, dan bersedekah atas nama mereka."

Ustaz Abdul Somad (UAS) dalam bukunya, *37 Masalah Populer* menjelaskan, seseorang boleh membaca Alquran dengan niat agar pahalanya diberikan untuk si fulan atau fulanah yang Muslim, baik yang masih atau di luar karib kerabatnya. Ia mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, "Membaca (Alquran) dan menghadiahkan bacaannya kepada orang yang sudah meninggal tanpa ada yang mengingkari, maka ini sudah menjadi ijmak (kesepakatan para ulama –Red)."

Mubaligh kelahiran Asahan, Sumatra Utara, itu juga menukil fatwa Syekh Ibnu 'Utsaimin tentang perkara ini, "Jika seseorang menghadiahkan amal saleh untuk mayat, misalnya, ia bersedekah dengan sesuatu dan ia niatkan (pahalanya) untuk mayat, atau shalat dua rakaat dan ia niatkan (pahalanya) untuk mayat, atau ia membaca Alquran dan ia niatkan (pahalanya) untuk mayat, maka tidaklah mengapa (boleh), tetapi doa adalah lebih afdal dari semua itu karena itulah yang ditunjukkan Rasulullah SAW."

> **Bukan amal orang lain kepadanya terputus. Karena, amal orang lain tetap mengalir kepadanya.**

Dengan disimpulkan, Nabi SAW memberi teladan berdoa untuk keselamatan orang-orang Islam yang menghuni alam barzakh.

Bagaimanapun, mengirimkan pahala membaca Alquran pun tak ada salahnya dalam Islam karena kalangan ulama membolehkannya.

Di samping itu, amalan demikian juga tidak bertentangan dengan pesan hadis, "Apabila manusia meninggal, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara." Sebab, UAS menjelaskan, perkataan "terputuslah amalnya" itu berarti si mayat tidak dapat beramal lagi.

"Bukan amal orang lain kepadanya terputus. Karena, amal orang lain tetap mengalir kepadanya, seperti badal haji, shalat jenazah, doa dan lain-lain," ujar dai yang alumnus Universitas al-Azhar Kairo (Mesir) itu. ■ **ed:** hasanul rizqa

Beasiswa Hafiz Alquran Ditambah

SIAK — Keberadaan pondok pesantren yang dikhususkan bagi penghafal Alquran terus menuai dukungan. Di Kabupaten Siak, Riau, pemerintah daerah setempat menyokong pembangunan Pondok Tahfiz Alquran al-Qudsy. Bupati Siak Alfedri memimpin langsung acara peletakan batu pertama lembaga yang beralamat di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, itu.

Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak bersyukur bila makin banyak anak-anak yang dapat menghafalkan Alquran. Untuk mendorong hal tersebut, pihaknya akan memberikan program beasiswa perguruan tinggi bagi hafiz dan hafizah.

"Kami akan evaluasi kembali program beasiswa unggulan daerah yang dibatasi sebanyak 50 orang per tahun. Ke depan, (beasiswa) akan ditambah menjadi 100 lebih, tetapi untuk anak yang kurang mampu," ujar Alfedri dalam acara tersebut, seperti dikutip *Antara*, Sabtu (5/9).

Dia akan mengevaluasi program beasiswa unggulan daerah di sejumlah perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa. Menurut dia, bantuan pendidikan itu tidak hanya membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga penghafal Alquran yang ingin meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi.

Oleh karena itu, ia menyemangati orang tua yang terus mengajak dan mengajarkan anak-anaknya agar konsisten mempelajari dan menghafalkan Alquran. Menurut ajaran Islam, Allah SWT menjanjikan surga bagi ayah dan ibu yang sukses membina buah hati mereka dalam mencintai Kitabullah.

"Kalau anak-anak kita ini hafal Alquran, kelak merekalah yang akan memakaikan mahkota dan jubah untuk orang tuanya di surga," kata dia.

Alfedri menyampaikan, saat ini makin banyak orang tua yang berminat menyekolahkan anak-anaknya ke pondok-pondok pesantren, termasuk pesantren tahfiz Alquran. Tren tersebut juga terasa di Kabupaten Siak.

"Saat ini sudah ada 37 pesantren di Kabupaten Siak, dan kebanyakan dari pesantren-pesantren tersebut tak cukup ruang kelas maupun asrama. Artinya, masyarakat semakin banyak untuk menyekolahkan putra-putrinya di pesantren," ungkapnya.

Bupati Siak berharap makin banyak generasi penerus bangsa yang mencintai dan mampu menghafalkan Alquran. Dengan begitu, boleh jadi Indonesia pada masa mendatang akan dipimpin sosok-sosok hafiz atau hafizah.

Pondok Tahfiz Alquran al-Qudsy diprakarsai seorang mubaligh lokal, Ustaz Muhammad Yunus. Awalnya, jumlah santrinya tercatat masih dua orang. Namun, seiring berjalannya waktu lokasi pondok pesantren tersebut berpindah ke Masjid Al Irsyad di Kampung Dayun. Pesertanya pun kian meningkat menjadi sebanyak 30 orang.

Dengan modal awal sebanyak Rp 60 juta, para pengurus Pondok Tahfiz Alquran al-Qudsy berniat membangun sebuah gedung yang terdiri atas dua lantai sebagai fasilitas pendukung untuk proses belajar-mengajar. Sejauh ini, santri setempat tidak dipungut biaya.

Mereka rata-rata sudah menghafal 16 juz Alquran. Beberapa di antaranya merupakan peserta program beasiswa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak. ■ antara **ed:** hasanul rizqa



BURSA

		JUMAT (4/9)
FTSE 100	5.864,20	13,34 ▲
Dax	13.038,62	19,15 ▼
Cac 40	5.036,56	27,04 ▲
Dow Jones	28.292,73	807,77 ▼
Nasdaq	11.458,10	598,34 ▼
Shanghai	3.355,37	29,61 ▼
Hang Seng	24.695,45	312,15 ▼
Nikkei	23.205,43	260,10 ▼
Straits Time	2.509,64	22,15 ▼
IHSG	5.239,85	40,96 ▼

Sumber: Marketwatch dan BEI 17.00 WIB

KURS

MATA UANG	JUAL	BELI
AUD	10.758	10.650
EUR	17.736	17.554
GBP	19.680	19.478
HKD	1.917	1.898
JPY	141	139
SGD	10.889	10.774
USD	14.859	14.712

JUMAT (4/9)

Sumber: BI sampai 17.00 WIB

KURS TENGAH DOLAR AS

JUMAT (4/9)



Sumber: BI

INDIKATOR

Realisasi *Marketing Sales* SMRA

Realisasi pendapatan *marketing sales* PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) sejak awal tahun hingga Agustus 2020 sebesar Rp 1,7 triliun atau 68 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp 2,5 triliun. ■



NYOMAN HENDRA WIBOWO/ANTARA



INOVASI UMKM Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki (kanan) meninjau produk UMKM Bali yang dipamerkan saat kunjungan kerja di Rumah Sanur, Denpasar, Bali, Ahad (6/9). Kegiatan tersebut sebagai stimulus mendorong kreativitas dan inovasi UMKM Bali dalam upaya mengangkat daya tawar produk ke posisi yang lebih baik pada masa pandemi Covid-19.

Laba Bersih PGN Anjlok

Tripledown effect penyebab anjloknya laba bersih PGN.

■ INTAN PRATIWI

JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, gas *subholding* di bawah PT Pertamina (Persero), mencatatkan kinerja keuangan yang kurang menggembirakan selama semester pertama 2020. Laba bersih emiten berkode saham PGAS di lantai bursa itu terkoreksi tajam.

Berdasarkan laporan keuangan PGN yang *Republika* terima pada Sabtu (5/9), laba bersih tercatat sebesar 5,7 juta dolar AS pada semester pertama 2020. Angka ini anjlok 87,6 persen dibandingkan periode sama tahun 2019 yang tercatat 54,04 juta dolar AS.

Direktur Keuangan Arie Nobelta Kaban mengatakan, pencapaian kinerja keuangan semester pertama 2020 dipengaruhi kondisi perekonomian saat ini *tripledown effect*, yakni pandemi Covid-19, harga migas dunia, dan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS.

"Kondisi tersebut berpengaruh kepada usaha PGN, terutama sektor hulu yang tergantung pada *market*, terutama harga minyak dan gas serta harga LNG. Rendahnya harga minyak dan gas menyebabkan penurunan pendapatan sektor hulu, sedangkan biaya pengoperasian tidak serta-merta mengikutinya," kata Arie.

Arie menjelaskan, harga minyak gas dan bumi yang tidak sebaik proyeksi yang dilakukan pada akhir 2019 berpengaruh pada pendapatan dari sektor hulu (*upstream*) dan pemulihan (*recoverability*) aset-aset di hulu yang dikelola PT Saka Energi Energi Indonesia (SEI), anak usaha PGN.

Akibatnya, laba bersih PGN juga merosot. Selama Januari-Juni 2020, emiten pelat merah tersebut tercatat meraup pendapatan sebesar 1,46 miliar dolar AS atau sekitar Rp 21,49 triliun (kurs tengah rata-rata semester I tahun 2020 sebesar Rp 14.624 per dolar AS). Realisasi ini turun 18,4 persen dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama, yakni 1,79 miliar dolar AS.

Arie menambahkan, pendapatan tersebut sebagian besar berasal dari kinerja operasional penjualan gas sehingga PGN konsolidasi mencatat laba operasi sebesar 193,09 juta dolar AS. Jumlahnya turun dibandingkan semester pertama 2019 sebesar 252,03 juta dolar AS.

Sementara itu, hingga Juni tahun ini EBITDA PGN tercatat sebesar 390,17 juta dolar AS atau turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 472,31 juta dolar AS. "Pada semester kedua, kami menargetkan peningkatan pendapatan perseroan dan tetap disertai dengan efisiensi dari sisi biaya," ujar Arie.

Arie mengatakan, sebagai respons terhadap dampak Covid-19 dan untuk menjaga kinerja perseroan, PGN tetap mengembangkan pembangunan infrastruktur dengan mengambil kebijakan optimasi efisiensi yang tidak terkait langsung dengan pendapatan dan keandalan jaringan pipa.

Selain itu, optimasi arus kas dilaksanakan melalui memprioritaskan anggaran investasi. Dengan begitu, menurut Arie, PGN diharapkan tetap mampu memberikan kinerja positif ditengah perlambatan ekonomi nasional dan global.

Selama periode Januari–Juni 2020, PGN berhasil menyalurkan gas bumi sebesar 2.016 BBTUD. Dengan perincian, volume distribusi sebesar 811 BBTUD dan volume transmisi sebesar 1.294 BBTUD.

Arie mengakui dampak pandemi Covid-19 sempat menjadi kendala dalam pengembangan infrastruktur dan layanan gas bumi. Namun, PGN tetap melaksanakan pembangunan sehingga pada periode Januari-Juni 2020 total pelanggan PGN tercatat lebih dari 417 ribu pelanggan.

> **Dampak pandemi Covid-19 sempat menjadi kendala dalam pengembangan infrastruktur dan layanan gas bumi.**

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menambahkan, PGN juga akan terus membangun dan memperluas infrastruktur gas bumi yang berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional di berbagai sektor bisnis dan pemulihan ekonomi nasional.

Melalui beragam insiatif dan inovasi yang terus dilakukan, PGN terus membangun proyek-proyek utama untuk ketahanan dan bauran energi di berbagai wilayah di Indonesia.

Salah satu inovasi untuk menjaga ketahanan pasokan dilakukan dengan intergasi jaringan pipa transmisi South Sumatera West Java (SSWJ) dengan jaringan pipa transmisi West Java Area (WJA) milik PT Pertagas. Integrasi ini akan meningkatkan kapasitas penyaluran gas dari Sumatra ke Jawa Barat sebesar 100-150 MMSCFD.

Selain itu, menurut Rachmat, saat ini PGN Grup melalui PT Pertagas sedang melaksanakan pembangunan pipa minyak rokan sepanjang 367 km yang ditargetkan dapat mengangkut sekitar 265 ribu barel minyak per hari dan dapat menekan biaya investasi 150 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,1 triliun.

Selanjutnya, PGN sedang melaksanakan regasifikasi LNG ke 56 lokasi pembangkit listrik PT PLN (Persero) untuk mendorong pemerataan akses listrik di berbagai wilayah. PGN juga melakukan gasifikasi kilang Pertamina di lima lokasi untuk peningkatan nilai keekonomian dan efisiensi energi kilang Pertamina. ■ **ed:** citra listya rini

PTFI: Proyek Smelter tak Ekonomis

■ INTAN PRATIWI

JAKARTA — Kelanjutan proyek pembangunan pabrik pemurnian atau smelter tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) masih menjadi topik hangat. PTFI tetap beranggapan proyek hilirisasi tembaga tersebut tidak bernilai ekonomis.

Direktur Utama PTFI Tony Wenas menegaskan, jika tetap berjalan, proyek itu akan merugikan perusahaan hingga 10 miliar dolar AS. Ia menjelaskan, proyek smelter membutuhkan investasi sebesar 3 miliar dolar AS dengan kapasitas 1 juta ton.

Padahal, Tony melanjutkan, harga jual hasil dari permurnian tembaga sampai 0,60 dolar AS. Sementara itu, harga jual di pasar hanya berkisar 0,20 dolar AS.

"Jadi, ada gap 0,40 dolar AS. Gap itu maka menjadi beban perusahaan. Jika dikalikan setahun maka 300 juta dolar AS. Kalau 20 tahun ya jadi 5 miliar dolar AS. Tambahkan saja sama investasi smelter 3 miliar dolar AS menjadi 10 miliar dolar AS," kata Tony dalam sebuah diskusi akhir pekan lalu.

Menurut Tony, yang paling menderita kerugian atas beban tersebut adalah PTFI dan pemegang saham PTFI lainnya, yakni PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum. Namun, PTFI tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan proyek smelter tersebut sesuai dengan ketentuan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI.

Hingga Juli 2020 realisasi pembangunan smelter katoda tembaga PTFI baru mencapai 5,86 persen. Realisasi itu berada di bawah perencanaan yang seharusnya pembangunan telah mencapai 10,5 persen pada Juli 2020.

Sementara itu, pembangunan fasilitas *precious metal refinery* (PMR), yang pembangunannya terpadu dengan smelter katoda tembaga, juga menunjukkan kemajuan yang lambat. Hingga Juli 2020, dari target rencana pengerjaan 14,29 persen, realisasinya baru mencapai 9,79 persen.

Hingga Juli 2020 PTFI telah menggelontorkan dana investasi pembangunan smelter tersebut hingga 290 juta dolar AS. Biaya modal yang dianggarkan mencapai 3 miliar dolar AS.

Tony mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah soal relaksasi target operasi smelter. Dia menegaskan, pihaknya belum menerima sikap resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menolak permohonan penundaan pembangunan smelter tersebut.

"Kami belum menerima surat penolakan. Kami terus berdiskusi soal *schedule* pembangunan smelter," kata Tony menegaskan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PTFI meminta kepada pemerintah agar pabrik pemurnian atau smelter tembaga yang semula harus beroperasi pada 2023 mundur menjadi 2024. Pasalnya, kontraktor pembangun menyatakan tidak bisa membangun smelter apabila didesak pada 2023 mendatang.

Wakil Direktur Utama PTFI Jenpino Ngabdi menjelaskan, saat ini progress pembangunan smelter baru 5,86 persen. Padahal, seharusnya memasuki semester kedua tahun ini target pembangunan smelter menginjak 10,5 persen.

"Hasil verifikasi progres smelter sampai Juli 2020 ini secara fisik 5,86 persen dari rencana 10,5 persen. Verifikasi ini dilakukan oleh Surveyor Indonesia. Dari yang sudah dilaksakana *feasibility study*, perencanaan praproyek atau *front end engineering design* (FEED) itu sudah selesai dan juga pemadatan lahan," kata Jenpino.

Kementerian ESDM hingga saat ini belum memberikan lampu hijau untuk PTFI memundurkan jadwal operasional smelter. Pemerintah masih yakin smelter PTFI masih bisa selesai tepat waktu.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat melakukan kunjungan kerja ke proyek smelter PTFI di Gresik. "Saya berharap proyek smelter PTFI ini bisa segera selesai. Kita akan terus mendorong ini karena jika ini selesai, kita tinggal mendorong industri hilirnya supaya bisa berkembang," ujar Arifin.

■ **ed:** citra listya rini

Waskita Karya Optimistis Divestasi Tol Lancar

JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk optimistis program divestasi ruas tol yang dimilikinya akan berjalan dengan lancar guna mendukung kinerja emiten konstruksi berkode saham WSKT tersebut di tengah pandemi Covid-19. Direktur Keuangan Waskita Karya Taufik Hendra Kusuma menjelaskan, jika seluruh program divestasi tol tahun ini berjalan lancar, perseroan diperkirakan akan dapat mengurangi utang sekitar Rp 20 triliun hingga Rp 21 triliun.

"Transaksi divestasi ruas tol itu membutuhkan waktu. Prosesnya bisa mencapai lebih dari enam bulan karena investor harus melakukan *due diligence* dan ada persyaratan *governance* yang harus dipenuhi. Namun, kami optimistis program divestasi ini akan berhasil sehingga kinerja tahun depan akan lebih baik," kata Taufik dalam keterangan di Jakarta, Ahad (6/9).

Pada 31 Agustus 2020, anak perusahaan Waskita Karya di bidang jalan tol, yakni PT Waskita Toll Road (WTR), telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) untuk pelepasan 30 persen kepemilikan pada ruas Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dengan nilai transaksi sebesar Rp 550 miliar. "Kami targetkan finalisasi transaksi di September atau Oktober tahun ini," ujar Taufik.

Taufik mengatakan, berdasarkan laporan keuangan 30 Juni 2020 yang dipublikasikan, Waskita Karya mencatatkan perolehan pendapatan usaha sebesar Rp 8,04 triliun. Meski mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pendapatan usaha tersebut merupakan pendapatan yang tertinggi apabila dibandingkan dengan tiga emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi lainnya. "Dari sisi operasional, Waskita membuktikan tetap dapat mempertahankan profitabilitas di tengah pandemi," kata Taufik.

Emiten yang melantai di lantai bursa sejak Desember 2012 itu juga mencatatkan laba sebelum beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sebesar Rp 1,2 triliun.

Meski meraih pendapatan usaha tertinggi dan EBITDA positif, BUMN konstruksi itu juga mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 1,1 triliun. Taufik mengatakan, kerugian tersebut lebih disebabkan beban bunga investasi jalan tol yang besar.

"Siklus bisnis jalan tol itu memang pada awal masa operasi akan mencatatkan *loss* (rugi) karena lalu lintas harian rata-ratanya (LHR) masih rendah dan bunga pinjaman mulai dibebankan. Selain upaya peningkatan realisasi LHR, strategi divestasi ruas tol yang sudah beroperasi kepada investor merupakan upaya yang sedang dilakukan agar beban keuangan menurun," kata Taufik.

Waskita Karya memegang kepemilikan atas 16 ruas jalan tol dengan total investasi Rp 150 triliun. Saat ini beberapa ruas tol dalam proses divestasi kepada investor antara lain ruas Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Cibitung-Cilincing, serta ruas Trans-Jawa, yaitu Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang.

Waskita Karya mengantongi kontrak baru senilai Rp 8,13 triliun per akhir Juni 2020. Jumlah ini diperoleh dari proyek pembangunan jalan tol, fasilitas kesehatan, gedung, industri, hingga proyek sipil lainnya.

"Proyek jalan tol masih menjadi pendongkrak nilai kontrak baru Waskita. Di sisi lain, demi meningkatkan diversifikasi jenis proyek, perseroan juga melaksanakan pembangunan fasilitas kesehatan, jaringan gas, dan pembangunan pabrik kelapa sawit," kata Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono.

Dari total nilai kontrak baru Waskita Karya pada semester pertama 2020 itu, sekitar 58 persen merupakan proyek beberapa ruas jalan tol. Proyek-proyek tersebut antara lain ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi paket III dan IV dengan nilai kontrak Rp 3,3 triliun dan ruas tol Pasuruan-Probolinggo seksi IV dengan nilai Rp 1,3 triliun.

Sepanjang 2020 Waskita Karya menargetkan nilai kontrak baru sebesar Rp 26 triliun. Sementara itu, hingga Juni 2020, Waskita Karya sudah mengantongi 30 persen dari target nilai kontrak baru. Perseroan optimistis target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

"Ke depan, Waskita fokus menggarap proyek-proyek konvensional sehingga tidak lagi banyak bergantung pada proyek dari *business development* ataupun proyek jalan tol saja," ujar Destiawan.

■ antara **ed:** citra listya rini



DOK BJB SYARIAH



HARI PELANGGAN

Direktur Utama Bank BJB Syariah Indra Falatehan (kiri) melayani langsung transaksi dan memberikan cendera mata kepada nasabah sebagai apresiasi pada Hari Pelanggan Nasional 2020 di Kantor Cabang Pembantu BSD, Tangerang Selatan, pekan lalu. BJB Syariah berkomitmen tetap meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan di tengah pandemi Covid-19 terutama melalui digitalisasi.

Pemulihan Ekonomi Butuh Disiplin Kesehatan

Protokol kesehatan tidak memiliki dampak jika hanya dilakukan segelintir orang.

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta pemerintah lebih fokus dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan. Menurutnya, perkembangan angka kasus Covid-19 yang terus melonjak dapat memicu masalah sosial dan ekonomi.

"Komitmen pengusaha sudah sangat serius dan punya kepentingan besar dalam komitmen protokol. Hanya, kadang kalau karyawan sudah di luar kantor, ke mana mereka pergi itu harus diawasi dan disosialisasikan oleh pemerintah," kata Sarman kepada *Republika*, Ahad (6/9).

Sarman mengatakan, penanganan wabah virus korona dengan pemulihan ekonomi nasional harus berjalan seiringan. Jika tidak seimbang maka dampak ekonomi akan lebih besar dan menjadi beban yang juga berat bagi pemerintah. Dampak selanjutnya, masyarakat akan ikut memikul beban karena semakin banyak pekerja yang dirumahkan.

Oleh sebab itu, Sarman mengatakan, pemerintah tidak boleh lengah dalam pengawasan dan sosialisasi protokol kesehatan. Perlu ada sanksi yang benar-benar memberikan efek jera bagi mereka yang tidak serius menjalani protokol kesehatan.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok dan Bogor menerapkan jam malam. Kebijakan itu berdampak pada kembali dibatasinya operasional toko ritel modern maupun pusat perbelanjaan. Sarman menilai, langkah itu tak efektif karena yang diinginkan pemerintah saat ini adalah agar ekonomi pulih kembali sembari menangani wabah.

Menurutnya, intensitas tinggi masyarakat dalam berbelanja justru pada sore dan malam hari. Hal itu dilakukan setelah aktivitas pekerjaan sehari-hari. "Jadi, menurut hemat kami, sejauh protokol kesehatan diterapkan dan diawasi itu sudah sangat penting daripada harus memberlakukan jam malam dan membatasi kegiatan usaha yang tidak berdampak terhadap angka virus korona," katanya.

Sarman mengatakan, kemungkinan terjadinya kontraksi ekonomi pada kuartal III 2020 sangat besar sehingga Indonesia pun akan mengalami resesi. Kendati demikian, ia berharap agar angka kontraksi ekonomi kuartal III bisa lebih kecil dari kuartal II.

Ia pun menyarankan agar berbagai bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk barang diubah menjadi bantuan tunai. Menurutnya, bantuan tunai lebih memiliki dampak luas karena masyarakat bisa membelanjakan sesuai kebutuhan hidupnya. Dampak lain yang akan dirasakan, warung-warung kecil hingga pasar tradisional dapat lebih hidup dan meningkatkan perputaran uang di tengah masyarakat.

Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga mendesak pemerintah tegas dalam menegakkan protokol kesehatan. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, seharusnya pemerintah bisa mengawasi protokol tersebut khususnya untuk pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan, bila perlu disertai sanksi tegas karena sudah ada regulasi dari pemerintah pusat. "Ini suatu kegiatan baru yang tidak umum, tapi memang harus dilakukan. Tentu harus sosialisasi terus dan pengawasan yang masif," ujarnya.

PHRI kini mulai mengejar peningkatan okupansi pada hari kerja. Pengusaha mengharapkan pemerintah mulai meningkatkan kegiatan pertemuan di hotel sembari menunggu pulihnya kepercayaan para wisatawan.

> **Ini suatu kegiatan baru yang tidak umum, tapi memang harus dilakukan.**

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, kontraksi pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata akan terjadi selama pemerintah belum meningkatkan kegiatan di hari kerja. Sebab, kegiatan dinas pemerintah punya peran penting dalam mengisi okupansi hotel.

Maulana mengatakan, peningkatan okupansi hotel saat ini baru terjadi pada hari libur, terutama ketika ada libur panjang hingga tiga hari pada akhir pekan.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nia Niscaya mengatakan, situasi pandemi ini memberikan pilihan yang tidak mudah. Kondisi tersebut menuntut seluruh sektor untuk menekan laju penyebaran Covid-19, tetapi di sisi lain perekonomian harus dibangkitkan kembali.

"Kita bersama-sama harus melawan penyebaran dengan melaksanakan protokol kesehatan secara benar dan taat," kata Nia.

Ia mengatakan, protokol kesehatan diterapkan demi kebaikan bersama untuk menjaga kebersihan serta keselamatan, sehingga semua pihak dapat melakukan berbagai kegiatan secara aman. Protokol kesehatan tidak akan memiliki dampak yang signifikan jika hanya segelintir orang yang melakukannya. Oleh karena itu, perlu ada kerja sama dari berbagai pihak dan harus diterapkan dengan taat dan konsisten. ■ **ed:** ahmad fikri noor

Tantangan Pelayanan Pelanggan di Masa Pandemi

■ RACHMAT SANTOSA BASARAH

Momen Hari Pelanggan Nasional (HPN) tahun ini memiliki makna tersendiri bagi Bank BJB Syariah. Tidak hanya dijalankan sebagai ajang seremonial, lebih dari itu, HPN menjadi momentum BJB Syariah menjadi lebih dekat dengan para nasabah.

Terlebih lagi, peringatan HPN tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 telah memaksa orang untuk hidup dalam tatanan normal baru, yaitu jaga jarak, menghindari kerumunan atau berkumpul banyak orang, memakai masker, dan lainnya.

Hal ini menjadi tantangan bagi perbankan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan di masa pandemi ini membutuhkan peningkatan signifikan, terutama di bidang digital melalui aplikasi *mobile banking* serta keandalan sistemnya.

Masa pandemi tidak menyurutkan antusias jajaran manajemen BJB Syariah untuk memberikan layanan langsung kepada nasabah di kantor cabang. Seluruh direksi melaksanakan pelayanan langsung kepada nasabah di beberapa cabang, seperti yang dilakukan Direktur Utama Bank BJB Syariah Indra Falatehan. Indra ikut melayani nasabah sejak pukul 09.00 WIB dan langsung mengajak beberapa nasabah berbincang santai seputar pengalamannya bertransaksi di BJB Syariah selama ini.

Setelah momen diskusi tersebut, Indra kemudian memberikan langsung sejumlah cendera mata dari BJB Syariah kepada para nasabah yang tengah berada di kantor tersebut. Hal ini dilakukan sebagai simbol apresiasi kepada loyalitas nasabah BJB Syariah. Indra mengatakan, hal terpenting dari peringatan HPN adalah terjalinnya komunikasi dengan nasabah guna memberi masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan di BJB Syariah.

"Dari perbincangan dengan beberapa nasabah, kami bisa mendapat masukan langsung untuk menjadi perhatian dan perbaikan layanan kepada nasabah kami," ungkap Indra, pekan lalu.

Dia mengatakan, diskusi dengan nasabah tak hanya bermanfaat bagi BJB Syariah untuk dapat berinovasi dalam layanan, tapi sekaligus juga menjadi momen yang penting bagi nasabah agar mereka dapat merasa didengar dan dipahami.

"*Ngobrol-ngobrol* seperti ini penting dilakukan untuk perbaikan layanan kami sekaligus juga pemenuhan kebutuhan nasabah. Masukan dari nasabah adalah hal yang penting. Jangan sampai, mereka merasa kecewa dan dipendam atau di-*share* di media sosial," tambahnya.

Tak hanya di ajang HPN, jalinan komunikasi yang baik antarpetugas dan nasabah dinilai telah menjadi nilai tambah BJB Syariah saat ini. Sebab, para petugas telah terbiasa melayani nasabah dengan ramah, tidak kaku, dan mengedepankan kekeluargaan.

Bentuk pelayanan seperti itu merupakan perwujudan konsep pelayanan humanis yang diterapkan BJB Syariah. Konsep pelayanan itu menjadi salah satu pilar dalam budaya perusahaan.

Dengan konsep ini, BJB Syariah berupaya menganggap nasabah sebagai manusia seutuhnya, bukan konsumen semata. Karena itu, bentuk pelayanan prima disertai visi untuk mengajak nasabah bertumbuh bersama menjadi sangat kental untuk bisa dirasakan dalam setiap pelayanan.

BJB Syariah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada setiap nasabah agar bisa menjadi solusi keuangan pilihan masyarakat. ■ **ed:** ahmad fikri noor

Bank Muamalat Siap Gaet Pasar Ritel Wakaf Sukuk

■ LIDA PUSPANINGTYAS

JAKARTA — Bank Muamalat bersiap menggaet pasar ritel untuk terlibat dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri kedua. Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Hayunaji mengatakan, perseroan akan melakukan sosialisasi dan kampanye pada nasabah.

"Untuk menggaet potensi wakif perorangan agar berperan serta membeli SW-002, BMI (Bank Muamalat Indonesia) akan melakukan sosialisasi dan *campaign* kepada nasabah maupun *market retail* tentang instrumen SW-002 dan apa manfaatnya," katanya kepada *Republika*, Ahad (6/9).

Bank Muamalat berharap agar kegiatan sosialisasi dan kampanye ini secara simultan juga dilakukan oleh para *stakeholder* yang terlibat, terutama pemerintah. Sosialisasi tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan.

Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat literasi tentang wakaf uang di Indonesia. Apabila ingin menyasar investor yang sudah ada saat ini juga sangat diperlukan peningkatan edukasi dan literasi mengingat salah satu faktor pertimbangan utama investor adalah besarnya imbal hasil.

Padahal, dalam sukuk wakaf, imbal hasil yang berupa kupon tidak didapatkan oleh investor, tapi penerima manfaat wakaf. Kupon akan dimanfaatkan untuk disalurkan kepada para penerima manfaat dalam sejumlah program yang sudah disiapkan oleh nazir.

Saat ini, Bank Muamalat terlibat dalam program CWLS Aceh sebagai penghimpun dana. Hayunaji mengatakan, CWLS Aceh menargetkan total penghimpunan dana sebesar Rp 50 miliar.

"Bersama dengan dua bank lainnya, CWLS Aceh menargetkan penghimpunan minimal Rp 50 miliar," katanya.

CWLS Aceh merupakan salah satu contoh adopsi CWLS untuk pembangunan daerah. Diskonto dan kupon dari sukuk wakaf yang diterbitkan pemerintah dalam program CWLS ini akan digunakan untuk sejumlah program strategis pengembangan ekonomi di Aceh.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menegaskan komitmen memfasilitasi pengembangan instrumen keuangan syariah dengan instrumen sukuk wakaf. Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, sukuk wakaf memfasilitasi wakif dalam menempatkan wakaf uang pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

Pemerintah telah melaksanakan penerbitan sukuk wakaf dalam skema CWLS dengan cara *private placement* pada 10 Maret 2020 lalu dengan nilai nominal sebesar Rp 50,8 miliar.

Dana pokok hasil penerbitan sukuk wakaf, seperti instrumen sukuk negara pada umumnya akan masuk dalam kantong pembiayaan umum di APBN. Dana digunakan untuk pembiayaan proyek atau kegiatan APBN secara umum.

Sementara, imbal hasil sukuk wakaf berupa diskonto dan kupon diserahkan kepada nazir untuk disalurkan pada penerima manfaat. ■ **ed:** ahmad fikri noor



KONSULTASI SYARIAH

DIASUH OLEH **DR ONI SAHRONI**
Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Hak Istri dalam Pendapatan Suami

Assalamualaikum wr wb.

Bagaimana Islam mengatur nafkah untuk istri? Apakah gaji suami adalah hak atau punya istri juga? Dan apakah nafkah istri dan uang belanja itu sama? Mohon penjelasan ustaz!

Fatimah – Depok

Waalaikumussalam wr wb.

Sebelum menjawab pertanyaan secara khusus, akan dibahas beberapa poin ke belakang agar jawabannya tepat dan proporsional sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin berikut ini.

Pertama, berbagi peran dan tugas. Misalnya, kewajiban si ayah (suami) untuk menyediakan nafkah keluarga dan istri (ibu) mengelola urusan keluarga, termasuk anak-anak. Pembagian tugas tersebut agar sakinah dan mawadah keluarga bisa dirawat karena hak dan kewajiban masing-masing ditunaikan dengan maksimal.

Kedua, pendapatan suami milik bersama. Ini karena *output* tugas suami dan istri untuk keluarga. Misalnya, nafkah yang disediakan oleh suami itu diperuntukkan untuk keluarga (bersama termasuk istri). Begitu pula dengan keluarga yang nyaman dengan anak-anak yang terdidik yang disediakan oleh istri itu diperuntukkan untuk keluarga (bersama termasuk suami).

Saat nafkah itu mampu disediakan oleh suami seorang diri maka peruntukannya juga untuk keluarga, termasuk istri. Begitu pula saat dalam kondisi di mana nafkah disediakan oleh suami dan istri bersama-sama (maksudnya suami bekerja dan istri juga bekerja) maka nafkah yang disediakan oleh keduanya juga diperuntukkan untuk keluarga, termasuk suami dan istri.

Ada beragam pandangan para ahli fikih terkait dengan nafkah yang tersedia itu diperuntukkan untuk apa saja. Tetapi, menurut pandangan yang diunggulkan dan menjadi pilihan bagi ulama kontemporer bahwa peruntukan nafkah itu merujuk kepada tradisi dan kelaziman di setiap tempat dan waktu itu menentukan jenis dan kadarnya dan kemampuan suami dan istri. Sehingga, tidak ada besaran dan batasan minimal kebutuhan keluarga yang harus disediakan oleh suami atau suami dan istri. Sebagaimana pandangan mazhab Malikiyyah dan sebagian Syafi'iyyah (Raudhah al-Thalibin 9/40).

Ketiga, di antara indikator kelaziman tersebut adalah kebutuhan-kebutuhan mendasar. Hal itu di antaranya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi segera, seperti biaya pendidikan anak-anak di bulan tersebut, kebutuhan dapur, angsuran rumah (jika ada), dan kebutuhan lainnya. Kemudian, dana-dana darurat yang harus disediakan, nafkah untuk orang tua suami dan orang tua istri sesuai dengan kondisinya dan kemampuannya, investasi sesuai dengan kemampuan, serta kebutuhan pribadi suami, istri, dan anak-anak (termasuk uang saku pribadi istri dan uang saku pribadi suami). Hal ini didasarkan pada pengertian para ahli fikih terhadap istilah nafkah istri yang maksudnya adalah nafkah keluarga, sebagaimana dibahas dalam beberapa referensi, seperti al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah dan Maushuat al-Usrah Tahta Ri'ayat al-Islam, Syekh Athiyah Shaqr.

Keempat, jika menelaah beberapa tuntunan Alquran dan hadis Rasulullah SAW beserta pandangan para ahli hadis maka disimpulkan bahwa ada hak keuangan istri atau uang saku istri yang harus dipenuhi. Di antaranya, firman Allah SWT, "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf." (QS al-Baqarah: 233).

Kelima, bermusyawarah. Apa saja daftar kebutuhan asasi yang harus dipenuhi, apakah uang saku pribadi istri itu termasuk dalam komponen kebutuhan mendesak, apakah nafkah orang tua suami dan istri itu termasuk kebutuhan mendesak, berapa alokasi uang belanja untuk kebutuhan pribadi istri, semua itu didasarkan pada musyawarah antarsuami dan istri karena peruntukan nafkah itu beragam dan merujuk kepada kelaziman dan kemampuan.

Keenam, dalam kondisi tertentu, menemukan kondisi ideal sesuai keinginan sulit dilakukan maka memenuhi kewajiban dengan maksimal, tapi lapang dada dan merelakan hak agar tepat dan adil itu menjadi pilihan.

Dalam kondisi kemampuan suami atau kemampuan suami dan ihsan (istri) dalam menyediakan nafkah keluarga itu terbatas, tetapi sudah ditunaikan dengan maksimal dan proporsional, maka istri dan suami menerima nafkah itu dengan penuh rasa sukur. Di antaranya, dengan menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang tersedia. *Wallahu a'lam.* ■

Waspada BERBAGAI ANCAMAN DI JAGAT MAYA

PIXABAY



Penggunaan teknologi digital tak luput dari persoalan keamanan siber, yakni peretasan data pribadi.

■ NOER QOMARIAH KUSUMAWARDHANI

Ketika pandemi Covid-19 terjadi, cara kerja masyarakat yang ada di Indonesia ikut berubah. Sebelumnya, karyawan bekerja di kantor menggunakan peralatan-peralatan yang sudah terproteksi, terenkripsi, dan menggunakan *firewall* yang kuat.

Saat terjadi pergeseran kebiasaan kerja, tentunya para pekerja menggunakan peralatan masing-masing yang terkadang tidak terproteksi. Salah satu yang menjadi masalah terbesar adalah penggunaan perangkat lunak (*software*) tak berlisensi.

Senior Director BSA|The Software Alliance APAC Tarun Sawney mengatakan, menggunakan perangkat lunak yang tidak berlisensi menjadikan peralatan tidak aman dan menyebabkan ancaman serangan siber menjadi sangat tinggi. Sebab, perangkat lunak tidak berlisensi seringkali sudah disisipi *malware*.

> **Ritel *online* juga berkembang pesat di Indonesia, bahkan perkembangannya tidak pernah kita sangka.**

Sawney mengungkapkan, lebih kurang 83 persen dari perusahaan di seluruh Indonesia saat ini diperkirakan menggunakan *software* tanpa lisensi. "Kerugian dari ancaman *malware* sangat besar," ujarnya.

Diperkirakan, Sawney melanjutkan, melalui data International Data Corporation (IDC), terdapat estimasi kerugian dari *malware* sekitar 10 ribu dolar Amerika Serikat (AS) per komputer. Artinya, rata-rata kerugian 2,4 juta dolar AS apabila seluruh perusahaan terinfeksi oleh *malware*.

Menurutnya, *software* asli akan selalu mendapatkan pembaruan secara otomatis dan dapat memperbaiki kerentanan keamanan, sehingga dapat memastikan kompatibilitas.

Kemudian, pembuat *software* juga dapat membantu perusahaan jika muncul kerentanan keamanan. Perangkat lunak, anti-*malware*, juga *firewall* yang berlisensi tentunya bekerja secara aktif melindungi perangkat dari serangan.

Software asli pun jarang mengalami kerusakan atau malafungsi. Pada Mei 2020 BSA meluncurkan *e-book* berisi pencegahan siber untuk bisa membantu para pemimpin bisnis dan perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara dalam mengatasi krisis Covid-19.

Kini, BSA membangun inisiatif Legalize and Protect yang memang sudah dilakukan sebelumnya. BSA|The Software Alliance juga meluncurkan kampanye ASEAN Safeguard.

Kampanye ini merupakan upaya perlindungan untuk mendukung bisnis di Asia Tenggara dalam mencapai legalisasi *software* sepenuhnya. "Kampanye ini ditujukan untuk memberikan konsultasi gratis kepada 40 ribu perusahaan yang tersebar di berbagai negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Filipina yang dianggap memang rentan terhadap ancaman siber tersebut," ujar Sawney.

Agar bisa mencapai target 40 ribu perusahaan yang dianggap berpotensi menggunakan *software* tak berlisensi, BSA|The Software Alliance menjangkaunya dengan media sosial juga menggunakan *electronic direct mail* (EDM).

Ancaman akibat pandemi

Selama pandemi, keterikatan masyarakat dengan dunia digital makin erat. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Henri Subiakto mengungkapkan, penggunaan internet mengalami lonjakan di berbagai Negara, termasuk Indonesia,

Terutama, penggunaan aplikasi daring yang dulunya tidak pernah dipakai. Contohnya adalah penggunan aplikasi konferensi video.

"Banyak sekali dipakai yang dulunya tidak pernah kita biasa pakai. Sekarang terjadi pelonjakan hampir melebihi 400 persen waktu *work from home* atau menerapkan PSBB. Ritel *online* juga berkembang pesat di Indonesia, bahkan perkembangannya tidak pernah kita sangka," kata Henri.

Menurutnya, pandemi Covid-19 ini membawa masyarakat semakin dekat dengan teknologi digital. Meski demikian, pengguna teknologi digital tidak luput dari persoalan keamanan siber, yakni peretasan data pribadi.

Mengutip pemberitaan, Henri menyebutkan beberapa kasus peretasan data pribadi yang belum lama ini sempat terjadi. Misalnya, 13 juta akun Bukalapak yang diretas oleh peretas asal Pakistan pada Maret 2020. Data jutaan akun tersebut dijual dengan satuan bitcoin.

Kemudian, pada Mei muncul lagi kasus serupa yang kali ini menimpa Tokopedia. Data Tokopedia diretas dengan jumlah yang sangat besar, yakni 91 juta akun. Pada bulan yang sama 1,2 juta akun Bhinneka diretas.

Ia mengatakan, kebocoran data terkadang muncul karena ketidakpahaman masyarakat terhadap risiko kebocoran data itu sendiri. Tak jarang pula, masyarakat sengaja memberikan data pribadi hanya karena tawaran hadiah menarik.

Ada juga yang terpaksa memberikan data pribadi karena tidak ada pilihan, misalnya, ketika mengajukan kredit. Peretasan data pribadi, menurut Henri, memiliki akibat signifikan pada lembaga yang terkena, yakni *legal liability*.

Organisasi dan negara pun akan dinilai lalai melindungi data pribadi. Seragan terhadap data pribadi ini berpotensi melahirkan *legal dispute*. Bukan tak mungkin, dampak lebih jauh lagi adalah terganggunya reputasi bisnis.

Henri mengungkapkan, reputasi yang jatuh bisa berdampak pada kepercayaan pengguna hingga investor dan pemerintah. "Kalau sudah reputasi bisnis terganggu maka investor yang mau meng-*invest* dana di perusahaan itu bisa ragu-ragu, bahkan pemerintah mulai ragu-ragu dengan reputasi perusahaan tersebut," katanya.

■ **ed:** setyanavidita livikacansera

Macam-Macam Data Pribadi

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Henri Subiakto menyampaikan, ada dua macam data pribadi. Yakni, data pribadi umum, seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nama orang tua, pendidikan.

Data tersebut sifatnya adalah data kependudukan dan tidak berubah-ubah. Kemudian, data pribadi dinamis, seperti terkait dengan orientasi ekonomi, politik, bahkan mungkin profil dalam keseharian.

"Kalau data umum ini kemudian diambil, diketahui, di-*hack*, kemudian dikuasai oleh orang lain, itu titik masuk untuk mendapatkan data yang lebih luas," ujarnya.

Data pribadi orang lain yang diretas biasa digunakan untuk penipuan atau *phishing*. Selanjutnya, data pribadi bisa digunakan untuk *telemarketing*.

Pemilik data tiba-tiba dihubungi perusahaan untuk ditawari produk tertentu. Peretas menggunakan informasi yang ada dalam data pribadi untuk membobol *payment gateway*, akun media sosial, dan lain-lain.

Lebih luas lagi, tujuan mengambil data pribadi digunakan untuk *profiling* target, membongkar kata sandi dan pinjaman daring, serta kartu prabayar. Yang dimaksud dengan *profiling* target adalah dengan mengumpulkan data pribadi dapat dianalisis demografi kecenderungan perilaku politik, ekonomi, dan masyarakat.

"Satu orang di-*profiling* tidak terlalu penting, tapi kalau sudah satu komunitas di-*profiling*, ratusan ribu orang di-*profiling*, jutaan orang di-*profiling*, maka itu menjadi semacam upaya untuk kegiatan-kegiatan politik maupun kegiatan ekonomi-politik," kata Henri.

Lalu, data tanggal lahir dan *e-mail* juga bisa dipakai untuk membongkar *password* pemiliknya. Data KTP yang bocor dipakai untuk aktivitas kartu prabayar dan ikut pinjaman daring secara diam-diam. ■ **ed:** setyanavidita livikacansera



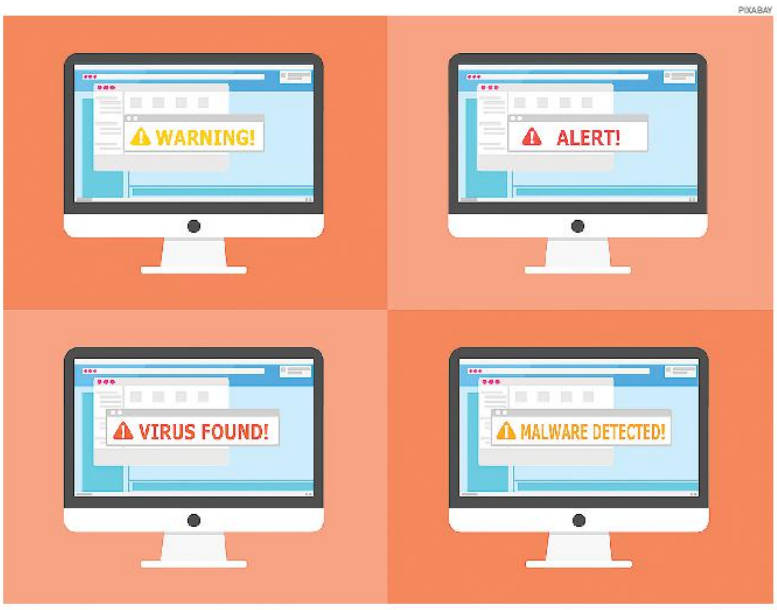
Amankan Data Kita

Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk mengamankan data diri kita ketika berada di jagat maya, di antaranya:

1. Mulai saat ini, ada baiknya kita mulai membudayakan keamanan informasi dengan cara selalu mengganti kata sandi secara berkala dan tidak menggunakan *password* yang mudah ditebak.
2. Selain itu, jangan membuka surel atau *link* mencurigakan atau yang tidak dikenali.
3. Hindari pula menggunakan perangkat lunak yang legal sehingga selalu ada *update* dan keamanan informasinya yang harus diikuti.
4. Pelajari semua aplikasi yang dipakai dan selalu lakukan pembaruan.
5. Gunakan koneksi internet dan protokol yang aman, jangan menggunakan Wi-Fi sembarangan dan tidak menunjukkan data pribadi untuk umum.

■ **ed:** setyanavidita livikacansera

PIXABAY



PERTAMBAHAN JUMLAH PASIEN COVID-19

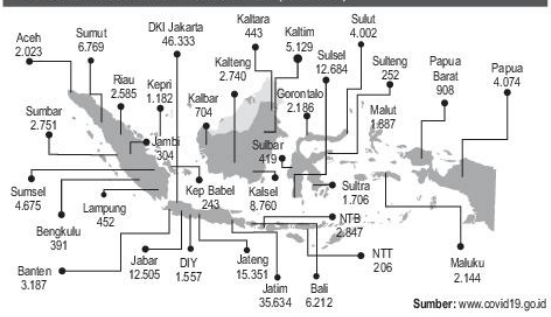
	Sabtu (5/9/2020)	Ahad (6/9/2020)
Positif	3.128	3.444
Sembuh	2.220	2.174
Meninggal	108	85

JUMLAH NASIONAL

Per Ahad (6/9/2020)

Positif	194.109
Sembuh	138.575
Meninggal	8.025

SEBARAN POSITIF COVID-19 (KASUS)



Sumber: www.covid19.go.id

THOUDY BADAI/REPUBLIKA



SOSIALISASI Anggota TNI memegang alat peraga kampanye protokol kesehatan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, (6/9). Angka positif Covid-19 di DKI sepekan terakhir mencapai 13 persen. Angka tersebut melampaui ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni dibawah 5 persen.

Tren Kasus Masih Tinggi

DKI masih menyumbang kasus tertinggi dengan penambahan lebih dari 1.000 kasus.

■ SAPTO ANDIKA CANDRA
AMRI AMRULLAH

JAKARTA — Tren penambahan kasus positif Covid-19 secara nasional masih tinggi. Dalam satu pekan terakhir, jumlah penambahan kasus masih menyentuh angka tertinggi, yaitu rata-rata di atas 3.000 kasus positif baru. Pada Ahad (6/9) kemarin, pemerintah merilis penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 3.444 orang dalam 24 jam terakhir.

Dari penambahan kasus itu, DKI Jakarta tetap 'mempertahankan' posisinya sebagai provinsi dengan kasus baru terbanyak, yakni 1.176 orang. Sementara itu, di posisi kedua ada di Jawa Timur dengan 303 kasus baru dalam satu hari terakhir. Fakta menarik lain, Sumatra Barat melejit ke posisi ketiga dengan melaporkan 244 kasus baru. Menyusul kemudian Jawa Tengah dengan 233 kasus dan Sulawesi Selatan dengan 209 kasus.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, peningkatan kasus dalam sepekan terakhir membuat pihaknya harus menyiapkan fasilitas tambahan. Saat ini, dua *tower* Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, disiapkan untuk fasilitas isolasi mandiri bagi warga yang tidak memiliki tempat untuk melakukan karantina mandiri.

"Rencana kami akan menggunakan *tower* 4 dan *tower* 5 Wisma Atlet Kemayoran sebagai Flat Isolasi Mandiri mulai Selasa (8/9) pekan depan," kata Doni, akhir pekan kemarin.

Pihaknya akan menggalakkan kampanye protokol kesehatan dengan mengusung tema "Pesan Ibu". Tema itu dipilih karena sebagai figur yang dihormati oleh anak-anaknya, ibu diharapkan bisa menjadi teladan dalam menjalankan protokol kesehatan. "Kalau kita sayang dengan ibu kita tentu kita akan menjaga jangan sampai ibu kita tertular, apalagi yang punya penyakit bawaan seperti jantung dan diabetes mudah tertular," kata Doni.

Per Ahad, dari lima provinsi dengan penambahan kasus terbanyak, hanya Jawa Timur yang mencatatkan jumlah pasien sembuh lebih banyak dibandingkan kasus barunya. Ada 364 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh di Jawa Timur per Ahad.

Dilihat dari grafik penambahan kasus harian, terlihat bahwa trennya masih terus menanjak. Bila pada Juli lalu jumlah kasus harian masih berada di kisaran 1.000 sampai 2.000 orang, pada Agustus mulai terjadi peningkatan signifikan, yaitu di atas 2.000 kasus baru.

Kondisinya makin memburuk pada awal September ini. Tercatat sudah tujuh kali penambahan kasus harian tembus angka 3.000 dalam sehari. Pertama pada 28 Agustus lalu dengan 3.003 kasus, lalu pada 29 Agustus dengan 3.308 kasus, 2 September dengan 3.075 kasus, 3 September 3.622 kasus, 4 September 3.269 kasus, 5 September 3.128 kasus, dan hari ini dengan 3.444 kasus baru.

Per Ahad, jumlah akumulasi kasus secara nasional menyentuh angka 194.109 kasus positif. Selain penambahan kasus baru, kasus sembuh juga dilaporkan mengalami penambahan sebanyak 2.174 orang sehingga jumlah kumulatif sembuh sebanyak 138.575 orang. Pasien yang meninggal dunia juga tercatat bertambah 85 orang sehingga total ada 8.025 orang yang meninggal dunia dengan konfirmasi positif Covid-19.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan, total kasus baru di DKI pada Ahad ada 1.245 kasus. Jumlah itu setelah ditambahkan 317 kasus dari data tanggal 3 dan 4 September 2020 yang baru dilaporkan. "Untuk *rate* tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 64.341. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 49.587," katanya, kemarin.

Ia mengatakan, *positivity rate* atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 14 persen. Sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 6,8 persen. Hal itu telah melampaui standar persentase kasus positif yang ditetapkan WHO, yaitu tidak lebih dari 5 persen.

Saat ini, DKI melalui Satpol PP menggencarkan penindakan atas pelanggaran penggunaan masker, begitu pula dengan bentuk pelanggaran PSBB lainnya. "Harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19," kata Dwi.

Ancam tutup permanen

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, mengatakan, pihaknya tidak akan segan menutup permanen kafe yang secara sengaja beroperasi secara penuh dan mengabaikan protokol kesehatan. Ancaman ini sebagai peringatan setelah sebelumnya Gubernur DKI Jakarta menegur pengelola Kafe Kopi Tebalik di Jakarta Selatan.

Kafe Kopi Tebalik masih beroperasi setelah mendapat sanksi penutupan sementara sehari setelahnya, Jumat (4/9). "Saya minta kafe yang nakal, mengabaikan protokol kesehatan diperiksa izinnya. Kalau *gak* ada izinnya saya tutup permanen," kata Arifin, dalam video Satpol PP yang diunggah, Sabtu (6/9) malam.

Kekesalan Arifin ini karena pihak pengelola Kafe Kopi Tebalik bukan hanya mengabaikan protokol kesehatan, tapi bersikeras tetap beroperasi. Bahkan, stiker peringatan dari Satpol PP DKI pun dengan sengaja dicopot pihak pengelola. ■ ed: ilham tirta

Delapan Kadis di Sidoarjo Terpapar Covid-19

■ DADANG KURNIA

SURABAYA — Delapan kepala dinas dan pegawai setingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terkonfirmasi positif Covid-19. Hal itu disampaikan oleh Plh Bupati Sidoarjo, Achmad Zaini. Achmad mengatakan, temuan itu didapat setelah pihaknya melakukan tes *swab* terhadap 768 orang pegawai di lingkungan pemkab.

Dari hasil tes tersebut, sebanyak 38 orang dinyatakan positif. Delapan di antaranya pejabat. "Dari 768 sampling *swab test* yang sudah dilakukan memang ada 8 kepala dinas dan setingkat kepala dinas terpapar (Covid-19)," kata Achmad saat dikonfirmasi, Ahad (6/8).

Namun, Achmad enggan menjelaskan secara perinci terkait kepala dinas yang terpapar Covid-19 tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan privasi. "Saya menjaga privasi mereka, mohon maaf," ujarnya.

Achmad mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pelacakan dari mana para pejabat tersebut terpapar Covid-19. Namun, dia mengaku, para kepala dinas tersebut tidak tertular dari almarhum Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin (Cak Nur) yang beberapa waktu lalu wafat akibat Covid-19. "Kalau dari *tracing* itu, mudah-mudahan tidak sampai ke sana (tertular Cak Nur). *Ndak* ada dugaan ke sana," kata dia.

Sejumlah pejabat yang mendampingi Cak Nur, saat berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri sebelum ia meninggal, ternyata dinyatakan negatif Covid-19. Achmad mengatakan, dari delepan kepala dinas tersebut, ada dua orang yang dinayatakan telah terkonversi negatif Covid-19. "Saat ini, alhamdulillah sudah ada dua yang sudah negatif, tinggal enam yang masih positif," kata dia.

Achmad pun memastikan, banyaknya kepala dinas yang terpapar Covid-19 tak akan mengganggu pelayanan di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Karena, kata dia, sejak 1 September, pihaknya telah menerapkan mekanisme kerja yang mengatur waktu masuk para pegawai.

"Jadi, 50 *work from home*, 50 persen *work from office*, jadi untuk layanan tidak terkendala. *Tracing* tetap jalan, dari dinkes jalan, mudah-mudahan tidak ada yang terpapar selanjutnya," kata dia.

Hingga Jumat, jumlah pasien positif yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 5.276 orang. Sebanyak 340 orang di antaranya dilaporkan meninggal dunia.

Selain di Sidoarjo, sedikitnya tiga pegawai di instansi pemerintahan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, juga terkonfirmasi positif Covid-19.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, sumber atau simpul penularan wabah korona di instansi tersebut saat ini masih ditelusuri oleh tim epidemiologi.

"Tim kami masih melakukan kajian mengenai sumber penularan ini," katanya, Sabtu (5/9).

Tiga pegawai itu merupakan hasil pelacakan kasus baru. "Jadi, tim tracing melakukan tes usap PCR kepada 20 orang di instansi tersebut pada 2 September. Hasilnya, tiga dari 18 orang yang hasil sudah keluar dinyatakan positif Covid-19," ujarnya. Untuk dua orang sisanya, Galih menyatakan pihaknya saat ini masih menunggu.

Jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung hingga saat ini tercatat sebanyak 301 orang.

Jawa Timur sendiri menempati posisi kedua akumulasi kasus terbanyak secara nasional dengan jumlah 35.634 kasus.

■ antara ed: ilham tirta

Tetap Isolasi Meski Sudah Negatif

■ OLEH **RR LAENY SULISTYAWATI**

Pulang dari rumah sakit bagi Latief Siregar, bukan berarti dapat langsung berkumpul dengan keluarga. Sebagai penyintas virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) yang baru saja terkonfrmasi negatif, Latief tetap harus melakukan isolasi selama 14 hari setelah pulang dari rumah sakit.

Ia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto pada 25 Agustus 2020 hingga diizinkan pulang pada 2 September 2020 setelah dua kali tes *swab* mengonfirmasi negatif Covid-19. Sesampai di rumah, Latief harus menjalani isolasi mandiri dan tidur terpisah dengan istrinya. Beruntung, istrinya dinyatakan negatif virus berdasarkan tes laboratorium, beberapa saat setelah Latief dinyatakan positif Covid.

Latief mengatakan, dokter melarang ia kembali berkumpul dengan istrinya sebagai satu-satunya kontak erat. "Dokter meminta saya tidur terpisah hingga tanggal 15 (September) besok," kata Latief saat mengisi webinar Berbagi Kisah Penyintas Covid-19 Alumni ITB @Depok, Sabtu (5/9).

Selama pandemi Covid-19, Latief mengatakan, ia sebenarnya sudah mengurangi beraktivitas di luar rumah. Misalnya, Latief mengaku memilih menahan diri melakukan aktivitas yang digemarinya, yakni lari selama enam bulan terakhir. "Kalaupun lari, saya mengambil saat subuh kemudian lari di tempat yang sepi dan memakai masker. Itu pun jarang sekali, kadang sepekan sekali," ujarnya.

Latief juga mengaku menerapkan kebiasaan gaya hidup sehat. Namun, ia memang tidak bisa meninggalkan pekerjaan di MNC Media yang mengharuskannya datang ke kantor. Ia pun menceritakan kronologi sebelum hingga akhirnya dinyatakan positif Covid-19.

Hari itu, pada 10 Agustus 2020, Latief mengaku menghadiri pertemuan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Keesokan harinya, 11 Agustus 2020, Latief mulai merasakan demam, tetapi dia memilih tetap masuk kerja di kantor. "Kebetulan saat itu persiapan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Saya tetap ikut rapat seperti biasa," ujarnya.

Selama empat hari hingga 15 Agustus 2020, Latief mendapatkan libur, tetapi ia tidak bisa menikmatinya karena demam yang tidak kunjung turun. Latief pun mulai curiga. Pada 16 Agustus 2020, Latief ke RS dan meminta tes *swab* mandiri sekaligus cek darah penyakit tipes dan demam berdarah dengue (DBD). Ia juga memutuskan melakukan isolasi mandiri di rumah sembari menunggu hasil tes.

"Kemudian pada tanggal 17 Agustus atau saat hari kemerdekaan Indonesia, hasil tes keluar dan saya positif Covid-19," katanya.

Latief menderita penyakit penyerta (komorbid), yakni hipertensi. Latief mengira kondisi tubuhnya sudah lebih baik hingga merasakan ada yang berbeda pada asam lambungnya pada 21 Agustus 2020.

Perutnya sakit dan hampir tidak ada makanan yang bisa dicerna, termasuk biskuit dan air putih.

Awalnya, ia memilih tidak menjalani rawat inap dan menjalani perawatan di di Rumah Sakit (RS) Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Namun, ia akhirnya menjalani perawatan di rumah sakit setelah rekan-rekannya mulai mencarikan rumah sakit untuk rawat inap dan mendapatkan kamar di RSPAD Gatot Soebroto.

Mulai 25 Agustus 2020, Latief pun menjalani perawatan medis di RSPAD Gatot Soebroto. Di RSPAD, ia mengaku harus menjalani serangkaian tes seperti elektrokardiogram (EKG) atau tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung dan tes darah yang diambil dari pembuluh vena atau arteri untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah.

Hasil radiologi menyebutkan bercak putih virus di paru-paru Latief meluas dan dokter sempat mengkhawatirkannya karena kondisi ini bisa menyebabkan stroke dan jantung. Karena menderita penyakit penyerta (komorbid) hipertensi, Latief juga mengalami pengentalan darah. ■ ed: ilham tirta

DOK BITTERBOOZE.COM



MENAKAR PERAN PERANTARA

Tengkulak masih berperan besar dalam rantai pasok kopi dunia. Bahkan di Vietnam dan Indonesia, negara produsen kopi kedua dan keempat terbesar di dunia, peran mereka mencapai 90 persen.

■ OLEH **SIWI TRI PUJI B**

Gelombang Ketiga Kopi memang sudah merambah ke berbagai penjuru dunia. Kesadaran konsumen terhadap riwayat kopi yang ditanam petani meningkat. Petani pun mulai memperhatikan penanaman dan proses pasca panen.

Pelaku gelombang ketiga ini bercita-cita memangkas rantai pasok kopi agar kesejahteraan petani terkerek. Petani pun diharapkan bisa berhubungan langsung dengan pembeli.

Tapi dalam rantai pasok kopi, tetap saja para perantara atau tengkulak kopi masih memainkan peran dominan di pasar kopi. Maklum saja, peran mereka sudah mengakar, bahkan sejak zaman kolonial.

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Institut Teknologi Bandung, University of Sydney, dan Wageningen University, pernah mengadakan penelitian tentang ini. Tepatnya tentang apa yang diistilahkan sebagai *relationship coffee*, bentuk hubungan antara pembeli kopi (dalam hal ini *roaster*) dan petani yang biasanya melibatkan interaksi pribadi, kepercayaan, transparansi harga, dan komitmen terhadap peningkatan mutu dan kesejahteraan petani.

Namun penelitian yang didanai Australian Center for International Agricultural Research dari 2008 sampai 2020 itu mengungkapkan bahwa upaya-upaya dalam *relationship coffee* justru tak banyak membantu dalam pengentasan petani dari kemiskinan. Pandangan bahwa pengumpul atau tengkulak itu eksploitatif juga tak selalu tepat.

Mereka justru kerap berperan sebagai pengawas mutu kopi dan penyedia logistik yang paling efisien bagi petani dan pembeli hilir. "Pengumpul juga memiliki peran penting lain, seperti penyedia pinjaman dan keperluan dasar yang sulit diakses petani," tulis laporan penelitian itu.

Masih sentralnya peran perantara atau *middleman* dalam rantai pasok kopi di Indonesia juga dicatat oleh Enveritas, organisasi nirlaba yang bertujuan membangun solusi keberlanjutan bagi petani kopi. Organisasi yang bermarkas di New York, Amerika Serikat ini pernah melakukan survei di Indonesia antara 2018 sampai awal 2020, dan mencatat bahwa 90 persen kopi petani rakyat di Indonesia dibeli oleh pengumpul atau pengepul untuk kemudian dijual di pasar kopi. Saat ini ada lebih dari 4.000 pengumpul yang menjadi "orang tengah" atau perantara bagi 1,37 juta petani kopi di Indonesia. Asal tahu saja, 96 persen kebun kopi di Indonesia merupakan perkebunan rakyat.

Tak hanya di Indonesia, peran perantara ini juga dominan di hampir semua negara penghasil kopi. Dalam seminar online yang diselenggarakan Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) pada Agustus lalu, Hub Manager Asia Enveritas Asia, Senthil Nathan, memaparkan data peran para *middleman* di empat negara penghasil kopi: Indonesia, Vietnam, Uganda dan Kolombia; mereka ada, namun pola ketergantungannya berbeda-beda.

Pengumpul di Kolombia, misalnya, hanya membeli 40 persen kopi petani. Sebanyak 60 persen sisanya dibeli oleh berbagai model pembeli, koperasi, korporasi atau bahkan dipasarkan langsung oleh petani. Sementara di Uganda, persentase peran tengkulak mencapai 80 persen. Bagaimana dengan Indonesia dan Vietnam? Di kedua negara ini, 90 persen lebih kopi dibeli oleh tengkulak.

Beda Indonesia dan Vietnam terletak pada jumlah tengkulak dan peran yang mereka mainkan. Jika di Indonesia terdapat 4.000 tengkulak untuk 1,34 juta petani, di Vietnam ada 3.000 pengepul untuk 600 ribu petani kopi. Sebagian besar pengepul (80 persen) di Indonesia adalah laki-laki, sedangkan hampir separuh pengepul di Vietnam perempuan. Di Vietnam hanya ada 28 persen yang berpendidikan menengah pertama, sedangkan di Indonesia mencapai hampir 50 persen.

Penelitian Enveritas ini juga mengungkapkan bahwa pengumpul di kedua negara "terlibat" tak hanya dalam penyediaan dan pengawasan mutu kopi, tapi juga dalam keperluan pribadi petani kopi. Sebanyak 70 persen pengumpul kopi di kedua negara, misalnya, memberikan pinjaman ke petani, baik untuk modal, transportasi, keperluan sekolah dan kesehatan keluarga petani.

Perbedaan antara pengepul di Vietnam ada pada pelatihan yang kerap diberikan kepada petani. Sebanyak 20 persen pengumpul di Vietnam memberi pelatihan penanaman dan pasca panen, sementara hanya ada 4 persen pengumpul di Indonesia yang menggelar pelatihan serupa.

Khusus di Indonesia, kata Nathan, studi ini menjelaskan ada tiga jenis pengumpul, yaitu di tingkat desa, tingkat kabupaten/kota, dan agen. Ketiganya memberikan layanan yang serupa kepada petani, antara lain berupa pemberian pinjaman, penyediaan pupuk dan benih, dan beberapa memberi pelatihan. "Secara umum, para pengumpul itu ikut membangun kesejahteraan petani karena hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain," katanya.

Suryono, Ketua Divisi Kopi Koperasi Alam Korintji Jambi, juga menuturkan peran penting pengumpul di tingkat petani kecil. Mereka kerap hadir di saat para petani membutuhkan jasa mereka. Persoalannya, tinggal para pengumpul dan petani itu diwadahi dalam satu organisasi atau koperasi agar punya visi yang sama dan membekali mereka dengan akses teknologi agar bisa berhubungan dengan pasar yang lebih luas. "Jika di tempat lain orang mengkampanyekan untuk memangkas para tengkulak, kami di Kerinci ini justru menggalakkan peran tengkulak sebanyak-banyaknya," kata Suryono.

Peran yang dimaksud Suryono tentu dalam pengertian positif. Semisal membantu memberikan akses teknologi bagi para pengumpul dan petani agar bisa lebih membuka pasar yang lebih luas dan modern. Hal yang diamini oleh Angga S, pengepul kopi Semendo di Sumatera Selatan, yang juga menjadi pembicara dalam seminar itu. "Kami di daerah merasakan betul bagaimana pengepul mengalami kendala. Jangankan mengakses harga kopi via internet, mencari sinyal saja susahnya bukan main," katanya,

Hal lain yang perlu dibenahi, kata Nathan, adalah pembekalan pelatihan bisnis buat petani dan pengepul dan menciptakan sistem transportasi kopi yang lebih efektif. Di masa pandemi sekarang ini, lantaran permintaan kopi menyurut di seluruh dunia dan kedai-kedai kopi tutup di banyak kota dan negara, pengepul pun mesti bersiasat mengatur transportasi kopi ke pasar.

"Pengumpul mengganti transportasi dengan kapasitas yang lebih kecil atau bekerja sama dengan pengumpul lain menyewa transportasi bersama-sama," kata Mahwida Nur Fitriasani, dari Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, yang mengamati dampak pandemi pada rantai pasok kopi. Sama seperti yang dialami sektor bisnis lain, pandemi juga memukul industri kopi dari hulu sampai ke hilir. ■

DOK RAINFOREST-ALLIANCE.ORG



PERLU WAKTU UNTUK JUAL LANGSUNG

Perdagangan langsung (*direct trade*) umumnya dianggap sebagai praktik yang positif dan bertanggung jawab secara sosial dalam industri kopi saat ini. Membeli kopi secara langsung pada petani akan memotong rantai perantara - para tengkulak dalam berbagai wujud - sehingga lebih banyak uang yang akan langsung diterima petani.

Di atas kertas, tampaknya menarik. Namun dalam praktiknya belum tentu demikian. Sekarang mulai umum terjadi di sentra-sentra produksi kopi: rumah-rumah *roastery* (pemanggang kopi) besar mendirikan kantor cabang untuk membeli langsung dari petani kecil, menghilangkan pembeli perantara namun membayar harga rendah pada petani. Maka kekhawatiran seputar keadilan dan keberlanjutan menjadi persoalan baru.

Pengamat perkopian Daniel Jaffee menulis dengan apik tentang hal ini dalam bukunya, *Brewing Justice* melalui anekdot tentang tengkulak hutan dan petani di Meksiko bernama Emilio. Ia memulai dengan Emilio yang mendapatkan satu peso untuk setiap kilogram kopi yang dia jual, sebelum dikurangi biaya bensin dan kebutuhan lainnya. Dia juga seorang petani kopi dengan beberapa petak lahan, dan dia mengaku tidak tahu harga. Artinya, dia sama-sama kurang informasi seperti petani lainnya dan percaya begitu saja pada pembeli besar yang membeli langsung kopinya.

Lalu apa bedanya dengan dia menjualnya pada tengkulak yang justru menawarkan keuntungan: dia tak perlu keluar uang untuk membeli bensin atau biaya transportasi dan biaya lain yang menyertai. Tengkulak mendatanginya, membeli hasil perkebunannya tanpa ia harus repot memilah kualitas kopinya.

Hal yang sama diamini Michael Sheridan, yang sering menulis tentang budidaya dan pemasan kopi di Kolombia. Perdagangan langsung bagi petani di pelosok, katanya, hanya indah dalam wacana. Dalam perdagangan langsung, fungsi tengkulak umumnya digantikan oleh organisasi semacam koperasi petani. Organisasi ini sering kali memiliki standar kualitas yang signifikan, dan banyak petani merasa kompensasi terlalu kecil untuk mengikuti aturan yang ditetapkan. Tanpa organisasi, petani memang lebih rentan terhadap eksploitasi, tetapi ada kebebasan di dalamnya.

"Tidak mengherankan bagi saya bahwa lebih banyak petani kecil yang tidak berkomitmen pada kualitas," tulis Sheridan. "Produksi hanya berorientasi pada kualitas saja."

Di sinilah, katanya, perantara menjadi bagian penting dari rantai pasokan; dia bersedia membeli kopi yang kurang lebih tidak bisa dijual ke organisasi mana pun atau siapa pun yang tertarik dengan kopi berkualitas. Jadi kalau ingin memotong perantara dalam rantai pasokan kopi dunia, katanya, maka terlebih dulu harus mampu mengatasi masalah yang saat ini hanya bisa diselesaikan oleh perantara.

Apakah upaya memotong perantara menjadi mustahil? Tidak juga. Salah satu contoh yang disodorkan terkait hal ini adalah apa yang dilakukan Vega Coffee, lembaga yang bertujuan untuk memotong perantara sebanyak mungkin secara manusiawi. Tujuan mereka adalah untuk melatih petani dalam penyangraian, sehingga petani secara kolektif mampu menjual kopi sangrai langsung ke konsumen di pasar online. Hal yang sama dilakukan Pachamama, sebuah perusahaan kopi milik petani yang terdiri dari lima koperasi di Nikaragua, Peru, Guatemala, Meksiko, dan Ethiopia, di mana kelompok koperasi melakukan *outsourcing* pemanggangan mereka ke perusahaan kopi besar, tetapi semua keuntungan dari penjualan dikembalikan ke para petani anggota koperasi.

Namun langkah yang berfokus pada petani seperti ini jarang terjadi. Pada kenyataannya, rantai perdagangan kopi biasanya terdiri dari sekelompok perantara yang beraneka ragam. Vega mengatakan bahwa sementara petani dibayar kurang dari 1 dolar AS per pound (1 pound setara 0,45 kg) untuk kopi mereka, perusahaan kopi menjual kopi mereka dengan harga lebih dari 20 dolar AS per pound. Namun untuk sampai pada harga itu, proses panjang juga dilakukan; penyortiran, pengolahan, teknologi penyimpanan dan seterusnya. Jadi jika ingin mencapai harga jual yang setara, proses panjang mengontrol kualitas juga harus disiapkan secara matang. ■ **ed:** siwi tri puji b